PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

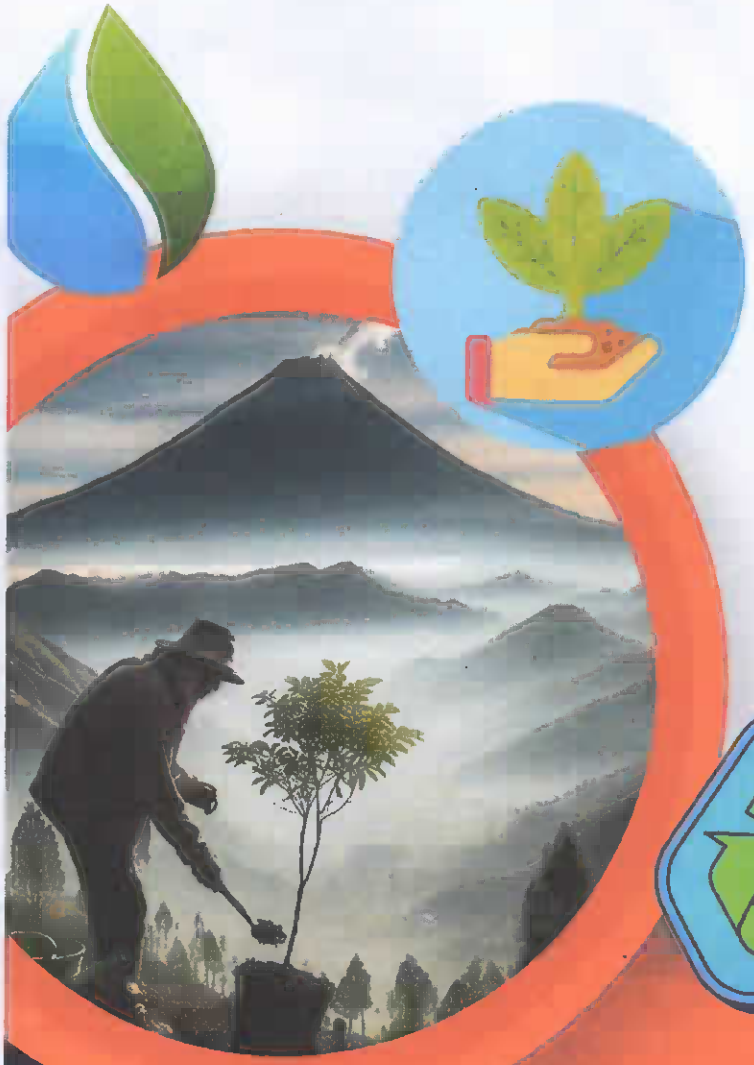

Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

Kabupaten Temanggung

Tahun 2025

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam, dan Infrastruktur	Petugas Verifikator
ADI WIBOWO, S.T.	**HANA AFIFAH, S.T.**
NIP. 198111012009031003	NIP. 199408222022022002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUDARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disusun. Maksud dan tujuan penyusunan Renja ini adalah memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Urusan Pemerintahan Bidang Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan serta Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Disadari penyusunan Renja ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan kami tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang berubah dengan cepat, oleh karena itu segala masukan dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Renja ini sangat diharapkan demi terwujudnya perumahan dan permukiman layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Temanggung, 03 Juli 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPRKPLH

PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR VERIFIKASI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2024-2026 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung 34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung 99
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 105
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 117
2.6 Inovasi Perangkat Daerah 117
2.7 Penghargaan 120
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 122
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 122
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung 124
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 129
4.1 Program dan Kegiatan 129
BAB V PENUTUP 160

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2023 11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2024 21
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung 34
Tabel 2.4 Capaian IKLH Kabupaten Temanggung 48
Tabel 2.5 Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari Tahun 2019-2024 49
Tabel 2.6 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 51
Tabel 2.7 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 53
Tabel 2.8 Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni 55
Tabel 2.9 Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2019-2024 56
Tabel 2.10 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 57
Tabel 2.11 Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2019-2024 59
Tabel 2.12 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 60
Tabel 2.13 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni 62
Tabel 2.14 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 64
Tabel 2.15 Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan 65
Tabel 2.16 Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024 66
Tabel 2.17 Data Rekomendasi Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan sebelum terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021 69
Tabel 2.18 Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 69

Tabel 2.19 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 72
Tabel 2.20 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 73
Tabel 2.21 Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung 75
Tabel 2.22 Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2019-2024 76
Tabel 2.23 Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2019-2024 ... 79
Tabel 2.24 Data Taman Kota Temanggung Tahun 2024 Kab. Temanggung 80
Tabel 2.25 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 83
Tabel 2.26 Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung 85
Tabel 2.27 Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 86
Tabel 2.28 Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2019-2024 88
Tabel 2.29 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 92
Tabel 2.30 Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2019-2024 93
Tabel 2.31 Daftar Depo Transfer Tahun 2024 95
Tabel 2.32 Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung 95
Tabel 2.33 Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan Kab. Temanggung 96
Tabel 2.34 Daftar Alat Pengolah Sampah di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung 96
Tabel 2.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 100
Tabel 2.36 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 106
Tabel 2.37 Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 117
Tabel 2.38 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2022-2024 118
Tabel 2.39 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 120
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 123

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 125
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 130
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....2
Gambar 2.1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja DPRKPLH Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPRKPLH Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

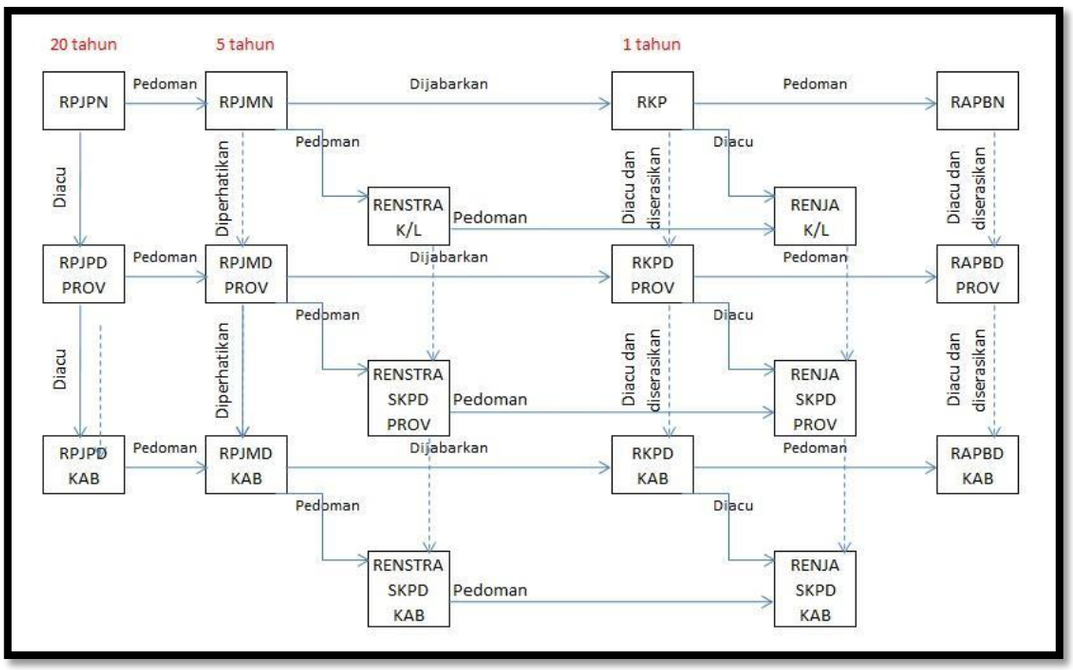

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPRKPLH, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPRKPLH, yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPRKPLH;
2) Kondisi pelayanan DPRKPLH;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH;
4) Data Pokok Pembangunan DPRKPLH;
5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPRKPLH;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan DPRKPLH.

b. Analisis gambaran pelayanan DPRKPLH;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPRKPLH adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan DPRKPLH.

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPRKPLH untuk kondisi tahun 2024-2026;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPRKPLH.

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun lalu berdasarkan Renstra DPRKPLH;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

   Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPRKPLH dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPRKPLH tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPRKPLH;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPRKPLH;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPRKPLH sampai dengan

tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPRKPLH.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPRKPLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPRKPLH;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRKPLH;
3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's *(Sustainable Developmnet Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPRKPLH.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan

pembiayaan daerah.

f. **Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKPLH.

g. **Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH.

h. **Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH dalam pembangunan daerah.

i. **Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPRKPLH;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPRKPLH merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. **Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. **Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH;**

Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. **Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPRKPLH dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPRKPLH dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja DPRKPLH yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRKPLH untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2025;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPRKPLH Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPRKPLH Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja DPRKPLH Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2023 terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.** Evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Sampai Dengan Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH :

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.803.600.000		5.800.934.324		99,95	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100		100		100		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.803.600.000		5.800.934.324		99,95	
	-	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	550	5.803.600.000	579	5.800.934.324	100	99,95	Terdapat pengembangan dari target awal sejumlah 29 rumah tangga
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Kemloko Kec Kranggan)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Bansari Kec Bansari)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Gilingsari Kec Temanggung)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Giripurno Kec Ngadirejo)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Katekan Kec Ngadirejo)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Paket	1		1		100		

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			(Desa Mranggen Kidul Kec Bansari)								
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Pendowo Kec Kranggan)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Purborejo Kec Bansari)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Rowo Kec Kandangan)	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki septik Individu Perdesaan (Desa Traji Kec Parakan	Paket	1		1		100		
			Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Wadas Kec Kandangan)	Paket	1		1		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%) 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				220.427.990		215.839.805		97,92	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5,00		4,50		100		
			Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	86,80		94,39		100		
	a.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				220.427.990		215.839.805		97,92	
	-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	72	220.427.990	72	215.839.805	100	97,92	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%) 100											
Predikat Sangat Tinggi											
	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				8.289.606.800		3.990.990.043		48,14	
			Persentase Rumah Layak Huni	%	89,42		95,50		100		

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	18,25		4,86		100		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100		
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100		100		100		
	a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				8.289.606.800		3.990.990.043		48,14	
	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	80	8.263.868.000	80	3.965.859.600	100	47,99	Penambahan anggaran pada perubahan tahun 2023 yang bersumber dari Dana Fiskal sebesar Rp. 7.021.868.000 tidak dapat terserap sepenuhnya karena keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga dalam proses pendataan, verifikasi, kesiapan calon penerima bantuan serta pelaksanaan kegiatan waktunya sangat terbatas
			Jumlah Jamban yang dibangun	Unit	33		33		100		
			Luasan rumah yang diplester lantai	M2	17.692		17.692		100		
			Jumlah rumah yang dipasang listrik	Unit	121		121		100		
	-	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	25.738.800	1	25.130.443	100	97,64	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%) 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN									
			Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100		100		100		
	5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				160.000.000		158.765.500		99,23	

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73		100		100		
			Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		100		100		
	a.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				160.000.000		158.765.500		99,23	
	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	160.000.000	1	158.765.500	100	99,23	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				524.003.200		503.206.084		96,03	
			Indeks Kualitas Air		46,00		64,07		100		
			Indeks Kualitas Udara		86,00		85,10		98,95		
	a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				127.907.200		123.894.222		96,86	
	-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	96	127.907.200	320	123.894.222	100	96,86	
	b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				396.096.000		379.311.862		95,76	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	396.096.000	1	379.311.862	100	95,76	
			Terlaksananya konservasi dan rehabiitasi lahan di Kabupaten Temanggung	Kegiatan	1		1		100		

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.143.748.800		1.122.193.274		84,34	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33		74,33		100		
			Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung		0,067		2,46		100		
			Cakupan RTH Publik		0,07		1,10		100		
	a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.143.748.800		1.122.193.274		84,34	
	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5,07	68.180.400	5,07	66.330.642	100	97,29	
			Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	Bulan	12		12		100		
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	7,96	1.075.568.400	7,96	1.055.862.632	100	98,17	
			Terpeliharanya Taman Kota	Bulan	12		12		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
			Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100		100		100		
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				35.001.300		33.887.443		96,82	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki	%	100		100		100	96,82	

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Dokumen Lingkungan Hidup								
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35.001.300		33.887.443		96,82	
	-	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	50	35.001.300	50	33.887.443	100	96,82	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
			Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,88		27,87		100		
	11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				80.000.000		77.329.433		96,66	
			Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67		100		100		
	a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		77.329.433		96,66	
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	9	80.000.000	16	77.329.433	100	96,66	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	%	100		100		100		

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			hidup yang ditindaklanjuti								
	13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				10.869.179.780		10.797.512.241		99,34	
			Persentase sampah yang tertangani	%	38,20		61,26		100		
			Cakupan layanan persampahan	%	55,00		68,51		100		
	a.	Pengelolaan Sampah				10.869.179.780		10.797.512.241		99,34	
	-	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	55.792	5.135.800.000	90.336	5.070.982.882	100	98,74	
			Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan	12		12		100		
			Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bulan	12		12		100		
			Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bulan	12		12		100		
	-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	300.000.000	5	296.967.000	100	98,99	
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Unit	5	399.999.780	5	397.923.859	100	99,48	
			Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bulan	12		12		100		

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.033.380.000		5.031.638.500		99,97	
	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA /TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	1.600	5.033.380.000	1600	5.031.638.500	100	99,97	
			Pembangunan TPS 3R Desa Pare	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Kaloran	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Danurejo	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Joho	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Mandisari	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Petirejo	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Gambasan	unit	1		1		100		
			Pembangunan TPS 3R Desa Ngaditirto	unit	1		1		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
	14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.729.218.341		12.584.167.045		98,86	
			Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100		
	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.852.464.241		11.730.894.173		98,97	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1781	11.852.464.241	1.781	11.730.894.173		98,97	
				Orang	137						
				Bulan	13						
	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah				111.268.000		106.911.185		96,08	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	5.998.500	1	5.998.200	100	99,99	

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Bangunan Kantor yang Disediakan								
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	19.418.500	100	97,09	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	19.996.400	100	99,98	
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.278.000	12	21.621.485	100	85,53	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	39.991.500	12	39.876.600	100	99,71	
	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				587.436.100		568.503.927		96,78	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	501.350	100	25,07	Belanja untuk kegiatan surat menyurat secara manual pada tahun 2023 berkurang karena adanya aplikasi Srikandi
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	94.027.200	12	93.982.754	100	99,95	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	491.408.900	12	474.019.823	100	96,46	
	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.050.000		177.857.760		99,89	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	83.050.000	24	82.945.260	100	99,87	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	1,00	89.942.500	100	99,94	

Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Keterangan
					K	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	21	5.000.000	21	4.970.000	100	99,40	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%) : 100											
Predikat : Sangat Tinggi											
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : 100										88,53	
PREDIKAT : Sangat Tinggi											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH : 99,95											
PREDIKAT : Tidak Tercapai											
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN						39.854.786.211		35.284.825.192			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala maupun hambatan dapat di temukan penyelesaian permasalahannya

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain
3. Terdapat Penambahan anggaran pada perubahan tahun 2023 yang bersumber dari Dana Fiskal tidak dapat terserap sepenuhnya karena keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga dalam proses pendataan, verifikasi, kesiapan calon penerima bantuan serta pelaksanaan kegiatan waktunya sangat terbatas

Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :
Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 langsung dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga manfaat kepada masyarakat dapat lebih cepat terealisasi

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya :
Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2024 mendatang dengan mengacu dan berkesinambungan dengan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2024

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						5.000.000.000	10.469.879.000		3.491.800	-	3.491.800	-	0,03	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100		100			100		100		100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan untuk Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			1.000	5.000.000.000	10.469.879.000		3.491.800		3.491.800	0	0,03	
-	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga			1.006	5.000.000.000	10.469.879.000	0	3.491.800	0	3.491.800	0	0,03	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)													0		
Predikat													Sangat Rendah		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.197.889.650		1.201.800.000	962.076.200		76.548.032		76.548.032		7,96	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	3,75		4,46			4,50		4,50		99,92		
		Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	88,50		88,30			94,39		94,39		100		
a.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksanananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rusunawa	6	1.197.889.650	6	1.201.800.000	962.076.200	6	76.548.032	6	76.548.032	100	7,96	
		Terlaksanananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Bulan	12		12			3		3		25,00		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	72	1.197.889.650	72	1.201.800.000	962.076.200	18	76.548.032	18	76.548.032	25,00	7,96	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)													25,00		
Predikat													Sangat Tinggi		
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.040.000.000		7.385.738.800	6.597.124.790		21.879.667		21.879.667		0,33	
		Persentase Rumah Layak Huni	%	96,25		95,54			94,50		94,50		98,91		
		Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,80		4,84			4,77		4,77		100		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100			0		0		0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100		100			100		100		100		
a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni	Unit	302	6.040.000.000	287	7.385.738.800	6.597.124.790	0	21.879.667	0	21.879.667	0	0,33	
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	302	6.040.000.000	287	7.385.738.800	6.597.124.790	0	21.879.667	0	21.879.667	0	0,33	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)													0		
Predikat													Sangat Rendah		
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
		Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100		100			100		100		100		
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				52.005.000		200.000.000	200.000.000	0	450.000		450.000		0,23	
		Persentase dokumen perlindungan dan	%	100		100			0		0		0		

No		Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
					K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			pengelolaan lingkungan hidup													
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		100			50,00		50,00		50,00		
	a.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	52.005.000	1	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-		-	
	-	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	52.005.000	1	50.000.000	50.000.000	0	-	0	-	0	0	
	b.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			1	150.000.000	150.000.000	0	450.000	0	450.000	0	0,30	
	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			1	150.000.000	150.000.000	0	450.000	0	450.000	0	0,30	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%)														0		
Predikat														Sangat Rendah		
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				808.020.000		799.999.950	442.955.150		40.707.973		40.707.973		9,19	
			Indeks Kualitas Air		53,80		52,70			64,07		64,07		100		
			Indeks Kualitas Udara		83,92		83,82			85,10		85,10		100		
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,067		0,067			2,46		2,46		100		
	a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		65,87	408.020.000	65,41	399.999.950	242.955.150	74,83	27.434.223	74,83	27.434.223	100	11,29	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Dokumen	1	54.020.000	1	50.000.000	30.000.000	0	615.000	0	615.000	0	2,05	

No		Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
											Triwulan I						
						K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
	-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	25	354.000.000	25	349.999.950	212.955.150	7	26.819.223	7	26.819.223	28,00	12,59	
	b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1	400.000.000	1	400.000.000	200.000.000	0	13.273.750	0	13.273.750		6,64	
	-	Pelaksanaan rehabilitasi		Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1	400.000.000	1	400.000.000	200.000.000	0	13.273.750	0	13.273.750	0	6,64	
				Terlaksananya konservasi dan rehabiitasi lahan di Kabupaten Temanggung	Kegiatan	1		1					0	-	0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)															7,00		
Predikat															Sangat Rendah		
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.515.037.500		1.300.000.000	2.050.000.000		275.533.094		275.533.094		13,44	
				Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	70,00		63,90			100		100		100		
	a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		1.515.037.500	7,96	1.300.000.000	2.050.000.000	7,96	275.533.094	7,96	275.533.094	100	13,44	
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	7,96	1.415.037.500	7,96	1.200.000.000	1.950.000.000	7,96	252.290.871	7,96	252.290.871	100	12,94	
				Terpeliharanya Taman Kota	Bulan	12		12			3		3		25,00		
	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1	23.242.223	1	23.242.223	100	23,24	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kewenangan Kabupaten/Kot													
		Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	Bulan	12		12			3		3		25,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)													62,50		
Predikat													Sangat Tinggi		
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
		Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100		100			100		100		100		
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				50.501.250		50.000.000	35.738.800		4.091.560		4.091.560		11,45	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		100			2,00		2,00		2,00	11,45	
a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi	Usaha dan/ Kegiatan	50	50.501.250	50	50.000.000	35.738.800	1	4.091.560	1	4.091.560	2,00	11,45	
-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	50.501.250	50	50.000.000	35.738.800	1	4.091.560	1	4.091.560	2,00	11,45	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)													2,00		
Predikat													Sangat Rendah		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	31,30		28,60			27,87		27,87		97,45		
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				101.002.500		50.000.000	50.000.000		2.348.000		2.348.000		4,70	
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100		100			0		0		0		
a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan	15	101.002.500	15	50.000.000	50.000.000	0	2.348.000	0	2.348.000	0	4,70	
-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	101.002.500	1	50.000.000	50.000.000	0	2.348.000	0	2.348.000	0	4,70	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)													0		
Predikat													Sangat Rendah		
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100			100		100		100		
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.045.119.475		12.085.000.000	9.164.999.700		1.184.395.060		1.184.395.060		12,92	
		Persentase sampah yang tertangani	%	61,00		60,21			64,20				100		
		Cakupan layanan persampahan	%	68,17		64,71			70,93				100		
a.	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola			6.045.119.475		12.085.000.000	9.164.999.700		1.184.395.060		1.184.395.060		12,92	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok			198	400.000.000	400.000.000	199	-	199	-	100	0	
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhi	Unit	5	150.000.000	5	5.000.000.000	2.999.999.700	5	139.080.039	5	139.080.039	100	4,64	
		Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bulan	12		12			3		3		25,00		
-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		5.895.119.475	90.279	6.685.000.000	5.765.000.000	23.714	1.045.315.021	23.714	1.045.315.021	26,27	18,13	
		Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan	12		12			3		3		25,00		
		Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bulan	12		12			3		3		25,00		
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bulan	12		12			3		3		25,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)													46,61		
Predikat													Sangat Tinggi		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				13.087.005.048		12.973.835.806	13.335.709.684		2.486.906.899		2.486.906.899		18,65	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100			100		100		100		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	13	12.164.505.048	13	12.099.413.456	12.436.291.184	3	2.335.100.442	3	2.335.100.442	23,08	18,78	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1729	12.164.505.048	1729	12.099.413.456	12.436.291.184	399	2.335.100.442	399	2.335.100.442	23,08	18,78	
			Orang	133		133									
			Bulan	13		13									
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	5	118.500.000	5	110.996.250	103.993.650	5	7.619.300	5	7.619.300	100	7,33	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	12	12.999.750	5.997.500	3	30.000	3	30.000	25,00	0,50	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	25.000.000	12	22.000.000	22.000.000	3	3.399.500	3	3.399.500	25,00	15,45	
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	23.000.000	12	20.000.000	20.000.000	3	1.284.300	3	1.284.300	25,00	6,42	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	27.500.000	12	25.997.500	25.997.150	3	2.905.500	3	2.905.500	25,00	11,18	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	35.000.000	12	29.999.000	29.999.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	625.500.000	3	617.000.000	626.999.700	3	133.612.157	3	133.612.157	100	21,31	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	2.000.000	2.000.000	3	144.000	3	144.000	25,00	7,20	

No		Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
						K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	95.000.000	12	90.000.000	100.000.000	3	23.741.128	3	23.741.128	25,00	23,74	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Laporan	12	527.500.000	12	525.000.000	524.999.700	3	109.727.029	3	109.727.029	25,00	20,90	
	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	178.500.000	3	146.426.100	168.425.150	3	10.575.000	3	10.575.000	100	6,28	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	85.000.000	24	78.000.000	100.000.000	6	8.515.000	6	8.515.000	25,00	8,52	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	82.500.000	1	60.426.100	60.425.150	0,25	720.000	0,25	720.000	25,00	1,19	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	13	11.000.000	13	8.000.000	8.000.000	4	1.340.000	4	1.340.000	30,77	16,75	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%)															25,32		
Predikat															Sangat Tinggi		
													RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		16,84	9,46	
													PREDIKAT		Sedang		
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		79,47		
													PREDIKAT		Tercapai		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Target 2024			Realisasi per Triwulan Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi 2024		Capaian Tahun 2024		Ket
				K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN				28.896.580.423		41.046.374.556	43.308.483.324		4.096.352.085		4.096.352.085			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala maupun hambatan dapat diselesaikan sejak awal
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan yang berupa kegiatan fisik akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya	Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2024 mendatang dengan mengacu dan berkesinambungan dengan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
   a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
   b. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
   c. Persentase rumah layak huni
   d. Persentase kawasan kumuh perkotaan
   e. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
   f. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
   g. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
   h. Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan
   i. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
   j. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
   k. Indeks Kualitas Air
   l. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
   m. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung
   n. Cakupan RTH Publik

o. Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
p. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
q. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan
r. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup
s. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
t. Persentase sampah yang tertangani
u. Cakupan layanan persampahan

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   b. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
   c. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   d. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
   e. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
   f. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   j. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   r. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

s. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
t. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
u. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
v. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan
w. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
x. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
y. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota

4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
   b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   c. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   d. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran : Nihil
6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program yaitu Indeks Kualitas Udara
7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan : Nihil

Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **“ Memuaskan ”** yaitu dengan nilai **100%** apabila dengan menggunakan pembanding target tahun 2023. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah
   Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan
2. Meningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan.

Apabila pembanding dengan menggunakan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 capaian kinerja dengan kategori **“Memuaskan“** dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah
   Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan
2. Meningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan.

Dari Tabel 2.1. dan 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIAN s.d. TW I 2024	STATUS CAPAIAN			
		2024	2025	2026	2024	2025	2026		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	**%**	**99,02**	**99,03**	**99,03**	**99,12**			**100**	√			
1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,46	4,11	3,75	4,50			99,16	√			
2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	88,30	88,40	88,50	94,39			100	√			
3. Persentase rumah layak huni	%	95,54	95,89	96,25	95,50			99,96	√			
4. Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,84	4,82	4,80	4,77			100	√			
5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	0			0				√
6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100			100	√			
7. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100			100	√			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Angka**	**65,41**	**65,66**	**65,87**	**74,83**			**100**	√			
A. Indeks Kualitas Air (IKA)	**Angka**	**52,70**	**53,30**	**53,80**	**64,07**			**100**	√			
B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	**Angka**	**83,82**	**83,87**	**83,92**	**85,01**			**100**	√			
8. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100			100	√			
9. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	0			0				√

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIAN s.d. TW I 2024	STATUS CAPAIAN			
		2024	2025	2026	2024	2025	2026		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
10. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	50,00			50,00			√	
11. Indeks Kualitas Air	Angka	52,70	53,30	53,80	64,07			100	√			
12. Indeks Kualitas Udara	Angka	83,82	83,87	83,92	85,10			100	√			
13. Persentase luas lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis	%	0,067	0,067	0,067	2,46			100	√			
14. Persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani	%	63,90	65,00	70,00	100			100	√			
15. Persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100			100	√			
16. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	100	100	100	2,00			2,00				√
17. Persentase sekolah berwawasan lingkungan	%	28,60	30,00	31,30	27,87			97,44	√			
18. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	100	0			0				√
19. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100			100	√			
20. Persentase sampah yang tertangani	%	60,21	60,50	61,00	64,20			100	√			
21. Cakupan layanan persampahan	%	64,71	66,44	68,17	70,93			100	√			

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR SASARAN

Terdapat 1 Indikator Sasaran dengan status capaian Sangat Tinggi yaitu:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Faktor pendorong	:	Adanya peningkatan kualitas air sungai dan dukungan dari KLHK dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara di Kabupaten Temanggung
Faktor penghambat	:	Hasil pengujian kualitas lingkungan tidak bisa langsung diketahui, dibutuhkan waktu dalam pengujian dan analisa di Laboratorium
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan status capaian Sangat Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Faktor pendorong : Adanya dukungan program-program dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman baik dari APBN maupun APBD antara lain:

1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, Baznas, Ruspin Program DAK Sanitasi
2. Program Jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat :

1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN
2. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman

kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan perencanaan awal

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendorong : Peningkatan Kualitas Air di Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : Jadwal Pengujian Kualitas Air akan dilaksanakan bulan Mei 2024

Rekomendasi dan tindaklanjut : Melaksanakan pengujian lebih awal sehingga Hasil Uji Kualitas Air dapat tersedia sesuai kebutuhan

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor pendorong : Dukungan Penganggaran yang bersumber dari APBN

Faktor penghambat : Belum ada Jadwal Pengujian Kualitas Udara Ambien dari Kementerian LHK

Rekomendasi dan tindaklanjut : Mendorong Percepatan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Udara Ambien

3. INDIKATOR PROGRAM

A. Capaian program dengan status capaian Sangat Tinggi terdapat sebanyak 16 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Faktor pendorong :
1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, program BSPS
2. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2024 , Bankeupemdes 582 unit dan APBD 287

Faktor penghambat :
1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi dan APBN
2. Kekurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data.

Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni

b. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi

Faktor pendorong	:	1. Pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi di 19 Desa/Kelurahan untuk 1006 kepala keluarga 2. Inpres air limbah sebanyak 603 kepala keluarga dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak
Faktor penghambat	:	Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung.

a. Persentase Rumah Layak Huni

Faktor pendorong	:	1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, program BSPS 2. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2024 , Bankeupemdes 582 unit dan APBD 287
Faktor penghambat	:	Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi dan APBN Kekurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data.

Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni

c. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Faktor pendorong	:	Adanya pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH dan pembangunan infrastruktur sanitasi
Faktor penghambat	:	Terbatasnya Anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan

d. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Faktor pendorong	:	Usulan program RUSPIN ke Disperakim Provinsi Jawa Tengah
Faktor penghambat	:	1. Warga calon penerima harus memiliki tanah yang digunakan untuk relokasi 2. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

e. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor pendorong	:	Adanya koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan
Faktor penghambat	:	1. Ketidaksesuaian peruntukkan tanah 2. Surat administrasi tanah tidak lengkap

Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Rapat koordinasi dan mediasi dengan pihak terkait

f. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Faktor pendorong	:	1. Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung 2. Tersedianya Truck Tinja dan IPLT.
Faktor penghambat	:	1. IPLT belum berfungsi optimal 2. Masih banyaknya jamban belum berseptitank
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	1. Melaksanakan program jamban keluarga 2. Mempersiapkan prasarana dan sarana dalam bidang sanitasi yang lebih lengkap lagi.

g. Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendorong	:	Peningkatan Kualitas Air di Kabupaten Temanggung
Faktor penghambat	:	Jadwal Pengujian Kualitas Air akan dilaksanakan bulan Mei 2024
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Melaksanakan pengujian lebih awal sehingga Hasil Uji Kualitas Air dapat tersedia sesuai kebutuhan

h. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor pendorong	:	Dukungan Penganggaran yang bersumber dari APBN
Faktor penghambat	:	Belum ada Jadwal Pengujian Kualitas Udara Ambien dari Kementerian LHK
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Mendorong Percepatan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Udara Ambien

i. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung

Faktor pendorong	:	Sampai dengan triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis seluas 253,06 Ha
Faktor penghambat	:	Faktor cuaca, apabila dilaksanakan penanaman pada akhir musim penghujan ketersediaan air yang bersumber dari air hujan sedikit sehingga dikhawatirkan pertumbuhan tidak maksimal (persentase kematian tanaman tinggi)
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya dan melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya

j. Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani

Faktor pendorong	:	Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin
Faktor penghambat	:	1. Kurangnya sarana prasarana dalam pemeliharaan RTH 2. Jumlah SDM yang terbatas 3. Hutan kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada

k. Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Faktor pendorong	:	1. Adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis

2. Permohonan dan kajian dilakukan terhadap dokumen yang diajukan oleh 4 Kegiatan dan/usaha

Faktor penghambat	:	Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK turunannya, sehingga kegiatan dan/atau usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat rincian teknis atau persetujuan teknis limbah B3

l. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Faktor pendorong	:	Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan
Faktor penghambat	:	Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	1. Mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata 2. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

m. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Faktor pendorong	:	Adanya sinergitas antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung
Faktor penghambat	:	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

n. Persentase Sampah yang Tertangani

Faktor pendorong	:	1. Terdapat penambahan cakupan pelayanan 2. Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa
Faktor penghambat	:	1. Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah dan terdata 2. Budaya buang sampah sembarang masih ada di masyarakat
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat desa

o. Cakupan Layanan Persampahan

Faktor pendorong	:	Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa

Faktor penghambat	:	Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah, terbatasnya armada dan SDM pengangkut samp
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Koordinasi dengan Pemerintah Desa serta menghimbau pengelola sampah desa agar melakukan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri.

B. Capaian program dengan status capaian Tinggi : nihil

C. Capaian program dengan status capaian Sedang sebanyak 1 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong	:	Terdapat 2 kegiatan/usaha yang mengajukan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPKLH)
Faktor penghambat	:	Salah satu dokumen yang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPKLH) yang diajukan masih memerlukan perbaikan
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Melakukan koordinasi dengan perusahaan dalam perbaikan dokumen

D. Capaian program dengan status capaian Rendah sebanyak 4 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)

Faktor pendorong	:	Penyediaan lahan relokasi sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana
Faktor penghambat	:	Belum adanya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban apabila terjadinya bencana

Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Identifikasi mitigasi bencana dan menyiapkan lahan relokasi.

b. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong	:	Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung akan menyusun dokumen lingkungan sebanyak 3 dokumen sebagai berikut: 1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 2. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 3. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).
Faktor penghambat	:	Kegiatan dimulai di triwulan II 2024
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Menyusun SK Tim penyusun dokumen

c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Faktor pendorong	:	Adanya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Faktor penghambat	:	Belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	Pelaksanaan kegiatan sudah dimulai pada bulan Maret Tahun 2024

d. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup

Faktor pendorong	:	Sudah proses pengusulan penghargaan Kalpataru dan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah
Faktor penghambat	:	1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun 2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun
Rekomendasi dan tindaklanjut	:	1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup 2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaaan terkait lingkungan hidup 3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan 5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu:

a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c. Bidang Pertanahan
d. Bidang Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

A. INDIKATOR SASARAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus serta klasifikasi dan rentang Nilai IKLH dapat sebagai berikut :

IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	IKLH	**69,65**	**65,61**	**69,51**	**69,86**	**74,83**	**74,83**
1	IKU	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10	85,10
2	IKA	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07	64,07
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
Perhitungan Rumus Lama			Perhitungan Rumus Baru				
IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)			IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)				

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nilai IKLH tahun 2024 apabila di bandingkan dengan tahun 2023 masih sama karena data yang digunakan merupakan data tahun 2023, nilai tersebut merupakan nilai tertinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dipengaruhi karena adanya peningkatan kualitas air maupun udara di Kabupaten Temanggung, akan tetapi masih terdapat kendala atau hambatan diantaranya hasil uji kualitas air tidak bisa langsung diketahui, karena harus melalui tahap pengujian di laboratorium terlebih dahulu hingga keluar sertifikat hasil uji. Upaya dalam mencapai target kinerja antara lain dengan melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan di Kabupaten Temanggung.

B. IKU PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. PERSENTASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI

Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%.

Tabel 2.5
Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Luas Kawasan Permukiman non Kumuh	Na	13.560,42	13.598,74	13.598,74	13.615,85	13.615,85

Luas Permukiman Wilayah Kabupaten	Na	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26
Persentase (%)	Na	98,71	98,99	98,99	99,12	99,12

Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2024 triwulan I yaitu 99,12%. Realisasi tersebut masih sama dengan tahun 2023 karena sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih dalam proses persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga target kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni adalah adanya dukungan program-program dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman baik dari APBN maupun APBD antara lain:

1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, Baznas, Ruspin,
2. Program DAK Sanitasi
3. Program Jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Sedangkan penghambatnya antara lain

1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN
2. kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data.

2. INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan

tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu)

$1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan

$5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang

$PI_j > 10{,}0$ → cemar berat

Tabel 2.6
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07	64,07

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 nilai IKA masih menggunakan data tahun 2023 yaitu sebesar 64,07 hal ini disebabkan karena jadwal pengujian kualitas air akan dilaksanakan bulan Mei 2024. Pada semester I tahun 2024 direncanakan pengujian kualitas air sejumlah 27 titik, hal ini dapat terlaksana karena adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah dan hilir. Faktor Pendorong lainnya yaitu adanya Pengujian Kualitas Air yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya untuk mencapai target antara lain dengan melaksanakan pengujian lebih awal sehingga hasil uji kualitas air dapat tersedia sesuai kebutuhan.

3. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO2 dan NO2, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:
   - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
   - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
   - Pemukiman padat penduduk (urban background),
   - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,

c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
   - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
   - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
e. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO2 = 20 µg/m³ dan NO2 = 40 µg/m³,
f. Ieu = 50%IndeksNO2 + 50% IndeksSO2 ,
g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = 100 – [50/0.9x (Ieu – 0.1)].

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10	85,10

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Untuk tahun 2023 Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dilakukan 2 kali yaitu disemester I dan II. Hasil Uji kualitas Udara Tahun 2023 yaitu 85,10. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023, hal ini disebabkan karena belum ada jadwal pengujian kualitas udara ambien dari Kementerian LHK. Faktor pendorong pelaksanaan pengujian kualitas udara di

Kabupaten Temanggung antara lain adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN.

C. INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sebagai dasar hukumnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus yaitu jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

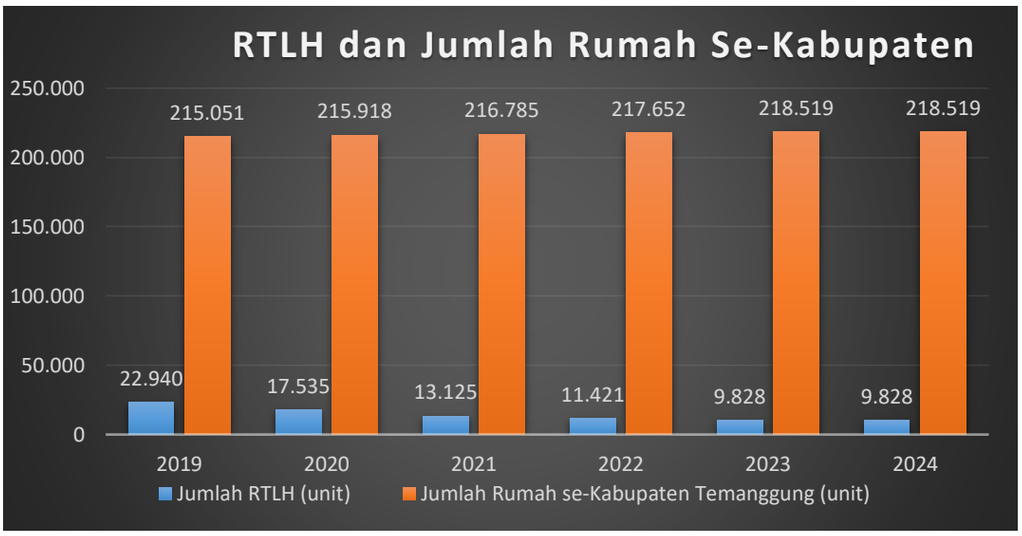

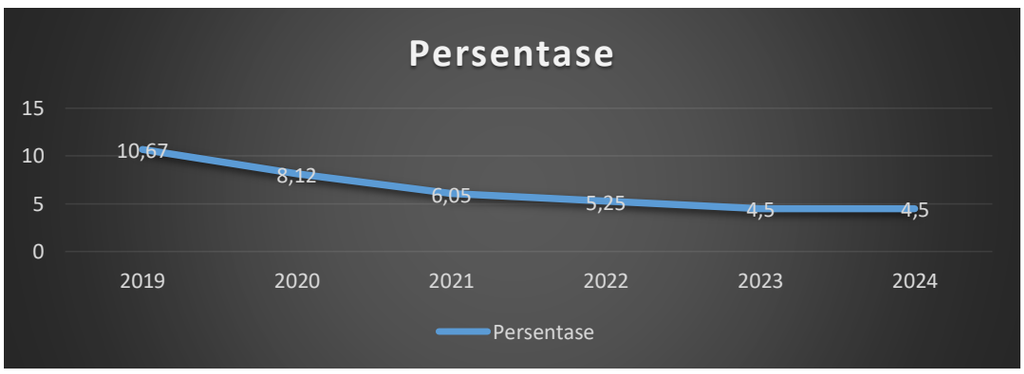

Gambar 2.1
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

Tabel 2.8
Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah RTLH (unit)	22.940	17.535	13.125	11.421	9.828	9.828
2	Jumlah Rumah se-Kabupaten Temanggung (unit)	215.051	215.918	216.785	217.652	218.519	218.519
3	Persentase (%)	10,67	8,12	6,05	5,25	4,5	4,5

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah RTLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024, jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2023 selalu berkurang dengan persentase sebesar 4,50% atau secara jumlah sebanyak 9.828 unit rumah tidak layak huni. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023 hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH belum dimulai pada triwulan I tahun 2024, masih dalam tahap verifikasi calon penerima bantuan. Pembangunan RTLH menjadi RLH diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, serta pemabangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2024 melalui Program Bankeupemdes 582 unit dan APBD 287 unit rumah.

Upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 diantaranya meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni.

2) CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan

pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dapat diketahui dengan formulasi perhitungan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikalikan 100%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga terlayani sanitasi	177.265	181.568	186.290	198.531	254.145	254.145
2	Jumlah seluruh rumah tangga	196.536	196.536	225.325	225.325	269.251	269.251
3	Persentase (%)	90,19	92,38	82,68	88,11	94,39	94,39

Berdasarkan tabel di atas persentase rumah tangga bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dari 90,19 % menjadi 92,38%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak meningkat 186.290 yang sejalan dengan pertambahan jumlah rumah tangga menjadi 225.325 unit, sehingga capaian akses sanitasi pada tahun 2021 menjadi 82,68% dan tahun 2022 menjadi 88,11%, sedangkan untuk capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 94,39% capaian akses layak termasuk didalamnya 5,22% capaian akses aman. Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 94,39% hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2024 belum dilaksanakan pembangunan dalam bidang sanitasi, masih dalam tahap sosialisasi dan pembentukan KSM.

Keberhasilan jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100

persen fasilitas sanitasi. Faktor pendorong capaian indikator ini tahun 2024 antara lain adalah DAK Sanitasi 19 desa untuk 1006 kepala keluarga dan inpres air limbah sebanyak 603 kk dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3) PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama 5 tahun terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah dikurangi RTLH. Rumus untuk memperoleh persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%. Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	173.702	177.349	179.150	206.231	208.691	208.691
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	196.536	217.652	218.519	218.519
3	Persentase (%)	88,38	90,24	91,15	94,75	95,50	95,50

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebanyak 208.691 unit dari 218.519 unit rumah di Kabupaten Temanggung atau secara persentase sebesar 95,50%. Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih sam dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH belum dimulai pada triwulan I tahun 2024, masih dalam tahap verifikasi calon penerima bantuan. Faktor pendorong capaian di atas adalah adanya pelaksanaan program-program di bidang perumahan dan permukiman seperti Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, program BSPS, Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2024, dan Bankeupemdes.

Sedangkan Faktor penghambatnya antara lain:

1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN
2. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 diantaranya meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH layak huni.

4) PERSENTASE KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

Kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Wilayah di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh yang ada sehingga untuk lebih mengintensifkan dan

memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh, Dasar Hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus Luas Kawasan Kumuh dibagi dengan luas Kawasan Perkotaan dikali 100 % (138,52 Ha dibagi 2.495,69 Ha X 100%) = 5,55%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan
Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	297,81	176,84	138,52	121,41	121,41	118,93
2	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2495,69
3	Persentase (%)	11,93	7,09	5,55	4,86	4,86	4,77

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian sampai akhir tahun 2024, yang menunjukkan luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami peningkatan sehingga capaian sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui sebesar 118,93 Ha atau secara persentase 4,77 % dengan pengurangan luasan kumuh yang dilaksanakan pada tahun 2024 seluas 2,48 Ha. Faktor penghambat capaian indikator di atas adalah terbatasnya anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman. Faktor pendorong capaian indikator di atas antara lain melalui kegiatan perbaikan RTLH dan pembangunan infrastruktur sanitasi, sedangkan upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

5) PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani (unit)	Na	Na	0	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana (unit)	Na	Na	0	0	0	4
3	Persentase (%)	Na	Na	100	100	100	0

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2019 sampai tahun 2020 data tidak diketahui sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak ada rumah kena bencana yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%. Sedangkan tahun 2024 terdapat 4 rumah yang terkena bencana tapi belum dapat

tertangani hal ini disebabkan karena belum tersedianya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban bencana. Faktor pendorong terkait capaian indikator ini adalah penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana.

6) **PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI**

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani (unit)	Na	37	0	0	24	0
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi (unit)	Na	27	0	0	24	0
3	Persentase (%)	Na	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2019 sampai tahun 2023, tahun 2019 data tidak diketahui sedangkan tahun 2020 sebanyak 37 rumah relokasi tertangani dari 27 rumah yang terkena relokasi sementara dari tahun 2021-2022 tidak ada rumah yang terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%. Tahun 2023 sebesar 100%, dengan rincian 10 unit rumah untuk relokasi di Desa Pingit Kecamatan Pringsurat, 9 unit rumah untuk relokasi di Desa Giripurno, 1 unit rumah di Desa Gondangwinangun Kecamatan Ngadirejo, 1 unit rumah di Desa Bulan Kecamatan Selopampang, 1 unit rumah di Desa Muntung Kecamatan Candiroto dan 1 unit rumah di Desa Campursalam, 1 unit rumah di Desa Traji Kecamatan Parakan. Pembangunan tersebut merupakan Program Bantuan Rumah RUSPIN oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Untuk capaian sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 100%. Penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah diusulkan melalui program RUSPIN yang ada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah selain itu dengan meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian PUPR, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi sedangkan masih terdapat sebagian warga belum memiliki tanah untuk relokasi rumah. Selain itu kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan

relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.

Indikator persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni merupakan dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Warga Negara yang terdampak akibat adanya Program Pemerintah sehingga dapat meminimalkan dampak sosial masyarakat untuk kelancaran Program Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah tersedia untuk relokasi dan kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik sekala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n) dibagi Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun (n) dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n)	Na	Na	Na	Na	811.798	811.798
2	Jumlah total warga Negara yang harus dilayani di tahun n	Na	Na	Na	Na	811.798	811.798
3	Persentase (%)	Na	Na	Na	Na	100	100

Berdasarkan tabel di atas data belum dapat tertuang secara meyeluruh dari tahun 2019 hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan rumus yang digunakan. Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2024 secara persentase capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong dari capaian indikator ini adalah

1. Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung
2. Tersedianya Truck Tinja dan IPLT.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

1. Masih menunggu penetapan Perda Retribusi
2. IPLT belum berfungsi optimal
3. Masih banyaknya jamban belum berseptitank

Untuk tindak lanjutnya antara lain dengan melaksanakan program jamban keluarga serta dengan mempersiapkan prasarana dan sarana bidang sanitasi yang lebih lengkap. Potensi pembangunan tahun 2024 antara lain melalui DAK Sanitasi 19 desa/kelurahan untuk 1006 kepala

keluarga dan inpres air limbah sebanyak 603 kepala keluarga dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

8) PERSENTASE PENYELESAIAN FASILITASI PERTANAHAN

Penyelesaian fasilitas pertanahan adalah program penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dihitung dengan membagi jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi dibagi jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan dikalikan 100%.

Realisasi persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi	8	8	39	8	18	1
2	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan	8	8	39	8	18	1
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dapat terealisasi 100%, tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) permasalahan pertanahan telah terfasilitasi 100%, sedangkan sampai dengan triwulan I tahun 2024 terdapat 1 fasilitasi permasalahan pertanahan dan terselesaikan 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian fasilitasi pertanahan untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan, sedangkan penghambat ataupun kendala terkait capaian indikator ini

diantaranya:

1. Ketidaksesuaian peruntukkan tanah
2. Surat administrasi tanah tidak lengkap.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

9) PERSENTASE DOKUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%.

Tabel 2.16
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

Uraian	Capaian sampai dengan			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	0
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1	1	1	3
Persentase (%)	100	100	100	0

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten

Temanggung Tahun 2022-2052 sebagai upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2022 s.d tahun 2052 di Kabupaten Temanggung.

Sampai saat ini masih terdapat hambatan yaitu dokumen RPPLH belum di Perda-kan sedangkan tindaklanjutnya adanya fasilitasi penyusunan Naskah Akademis RPPLH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 dan penyusunan Perda ditahun 2023. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 sedang dilakukan proses finalisasi Raperda RPPLH oleh Kemenkumham.

Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung akan menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Pada Triwulan I proses penyusunan adalah dalam tahap pembentukan tim dan penyusunan SK Tim yang sudah disahkan oleh Pj. Bupati, sedangkan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan Penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2024 sudah dilaksanakan proses kick off.

10) PERSENTASE PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan

bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL. Sebelum terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 Izin Lingkungan yang dikeluarkan merupakan persetujuan rekomendasi sedangkan setelah terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 persetujuan lingkungan yang dikeluarkan adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan persetujuan.

Dasar Hukum indikator program di atas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikali dengan 100%. Capaian indikator program dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Data Rekomendasi Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan sebelum terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Rekomendasi Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	14	17	0
2	Jumlah Perusahaan atau Kegiatan yang Mengajukan Rekomendasi Persetujuan	14	17	0
	Persentase	100	100	0

Tabel 2.18
Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	Na	Na	0	1	3	1
2	Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	Na	Na	0	1	3	2
3	Persentase	Na	Na	0	100	100	50,00

Pada tahun 2022 capaian persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup sudah mencapai target, dari 1 usaha/kegiatan yang

mengajukan persetujuan lingkungan sudah dapat dilakukan penilaian dan diterbitkan persetujuan. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 3 permohonan persetujuan lingkungan dan sudah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) RSK Ngesti Waluyo dan Persetujuan DELH RS PKU Muhammadiyah Temanggung yang disetarakan dengan Persetujuan Lingkungan.
2. Diterbitkan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) PT. Permata Kencana Jaya.

Pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan/usaha yang mengajukan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPKLH) yaitu Kegiatan Penataan TPA Eksisting dan Pembangunan TPST Sanggrahan di Desa Sanggrahan dan Kegiatan pergudangan oleh PT. Pandawa Lima Santosa. Persetujuan PPKLH yang sudah disetujui yaitu kegiatan Penataan TPA Eksisting dan Pembangunan TPST Sanggrahan, sedangkan dokumen lingkungan PT. Pandawa Lima Santosa masih dalam proses perbaikan. Selain itu masih terdapat hambatan terkait dengan capaian indikator ini antara lain Kabupaten Temanggung belum memiliki Tim Uji Kelayakan, sehingga dalam penilaian dilakukan di DLHK Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan upaya untuk mendukung capaian indikator ini antara lain melakukan sosialisasi pada perusahaan yang belum memiliki persetujuan lingkungan.

11) INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai

kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$: IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu)

$1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan

$5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang

$PI_j > 10{,}0$ → cemar berat

Tabel 2.19
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07	64,07

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 nilai IKA masih menggunakan data tahun 2023 yaitu sebesar 64,07 hal ini disebabkan karena jadwal pengujian kualitas air akan dilaksanakan bulan Mei 2024. Pada semester I tahun 2024 direncanakan pengujian kualitas air sejumlah 27 titik, hal ini dapat terlaksana karena adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah dan hilir. Faktor Pendorong lainnya yaitu adanya Pengujian Kualitas Air yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya untuk mencapai target antara lain dengan melaksanakan pengujian lebih awal sehingga hasil uji kualitas air dapat tersedia sesuai kebutuhan.

12) INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

h. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO2 dan NO2, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
i. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:

- Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
- Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
- Pemukiman padat penduduk (urban background),
- Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,

j. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,

k. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
   - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
   - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),

l. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO2 = 20 µg/m³ dan NO2 = 40 µg/m³,

m. Ieu = 50%IndeksNO2 + 50% IndeksSO2 ,

n. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = 100 – [50/0.9x (Ieu – 0.1)].

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10	85,10

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Untuk tahun 2023 Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dilakukan 2 kali yaitu disemester I dan II. Hasil Uji kualitas Udara

Tahun 2023 yaitu 85,10. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023, hal ini disebabkan karena belum ada jadwal pengujian kualitas udara ambien dari Kementerian LHK. Faktor pendorong pelaksanaan pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung antara lain adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN.

13) PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS TERTANGANI TERHADAP TOTAL LUAS LAHAN KRITIS

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukkannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah

disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,

3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.21
Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58		-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41		722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21
20	Wonoboyo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisan Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

Untuk mengetahui capaian proporsi luasan lahan kritis di Kabupaten Temanggung yang diupayakan penanganannya digunakan formulasi perhitungan luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Tabel 2.22
Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,17	0,17	0,10	1,75	2,46	2,46
Luas Lahan Kritis yang diupayakan Penanganannya	Ha	Na	12,89	12,89	180,275	253,063	253,063
Luas Lahan Kritis	Ha	Na	7.566,5	7.566,5	10.280,46	10.280,46	10.280,46

Pada tahun 2021 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung seluas 10,4716 Ha dari 10.280,46 Ha lahan kritis di Kabupaten Temanggung. Luasan lahan kritis yang diupayakan penanganannya pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu seluas 5 Ha tiap tahunnya, sedangkan tahun 2022 upaya penanganan lahan kritis

dilaksanakan pada lokasi bekas galian c di Agroforestry Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung seluas 8,5 Ha dan kegiatan konservasi dengan metode vegetatif melalui Gerakan Konservasi Tanah dan Air berkelanjutan di 10 Kecamatan di lereng gunung Sumbing, Sindoro dan Prau. Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung hingga tanggal 31 Desember 2022 telah menangani lahan kritis seluas 180,275 Ha.

Untuk tahun 2023 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis dengan kegiatan pemulihan lahan seluas 5,5 Ha melalui pembentukan kampung alpukat dengan penanaman alpukat sejumlah 2000 pohon di Dusun Ngetuk, Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung yang dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman di 11 Kecamatan dengan luas 67,288 Ha. Sehingga, total penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2023 seluas 253,063 Ha. Sedangkan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023, hal ini disebabkan karena pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis akan dimulai pada saat awal musim penghujan. Apabila dilaksanakan penanaman pada akhir musim penghujan dan kemarau, ketersediaan air yang bersumber dari air hujan sedikit sehingga dikhawatirkan pertumbuhan tidak maksimal (persentase kematian tanaman tinggi). Pada tahun 2023 baru dapat memulai pelaksanaan gerakan penanaman pada akhir tahun dikarenakan kondisi cuaca yang belum mendukung. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi lahan kritis adalah melalui kegiatan Pemulihan lahan bekerja sama dengan KLHK di Desa Kwadungan Gunung seluas 5,5 ha.

Faktor pendorong capaian upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung antara lain adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, KLHK, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan

organisasi relawan yang berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman. Sedangkan faktor penghambat terkait upaya penanganan lahan kritis antara lain diperlukan dana/anggaran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penanganan lahan kritis.

Upaya pencapaian target kinerja tahun 2023 yang akan dilaksanakan dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung antara lain melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintahan, maupun masyarakat umum dan juga melakukan inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya serta melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya.

14) PERSENTASE LUAS RTH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TERTANGANI

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dengan target capaian adalah Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani. Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011- 2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Formulasi perhitungan Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani menggunakan rumus luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani dibagi dengan luas RTH Milik Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani maupun

luas RTH Milik Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	100	100
Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani (M^2)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,21
Luas RTH Milik Pemerintah Daerah (M^2)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,21

Luasan RTH pada tahun 2024 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya perubahan fungsi RTH menjadi Non RTH. Faktor pendorong capaian tersebut karena responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik serta kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1. Keterbatasan lahan RTH
2. Pengelolaan RTH yang ada baru sebatas pemeliharaan taman-taman kota belum dapat dilakukan pengembangan
3. Hutan Kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya
4. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik/taman
5. Pengelolaan dan penataan terbatas
6. Jumlah SDM yang terbatas.

Untuk rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani antara lain dengan pengelolaan RTH Publik yang sudah ada. Data Taman Kota di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Data Taman Kota Temanggung Tahun 2024
Kabupaten Temanggung

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	SATUAN
I	**TAMAN KOTA**			
1	Alun-alun	Alun-alun kota Temanggung	10.465,37	M2
2	Taman Pancasila	Jl Jend Sudirman Temanggung	985,20	M2
3	Taman Bendo	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.050,00	M2
4	Taman Kr Tumaritis	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.373,95	M2
5	Taman Gedung DPRD	Jl Lingkar Alun-alun Temanggung	243,00	M2
6	Taman Siklontong	Jl Dr Wahidin Temanggung	101,46	M2
7	Taman Brojolan	Jl Diponegoro Temanggung	261,80	M2
8	Taman Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.236,75	M2
9	Taman Boulevard Stadion	Jl Jend Sudirman Temanggung	320,00	M2
10	Taman Eks Kerkoff	Jl Suyoto Temanggung	414,00	M2
11	Taman Eks Stasiun I	Jl Lingkar Setda Temanggung	722,00	M2
12	Taman Eks Stasiun II	Jl Lingkar Setda Temanggung	141,00	M2
13	Taman Pramuka	Jl Lingkar Setda Temanggung	59,50	M2
14	Taman Jago	Jl WR Supratman Temanggung	67,50	M2
15	Taman Kali Progo	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	7.196,20	M2
16	Taman Pikatan	Pertigaan Jl. Pahlawan Temanggung	630,00	M2
17	Taman Bambu Runcing Parakan	Jl Kosasih Parakan	17.520,00	M2
18	Taman Kali Galeh	Jl.Suwaji Parakan	7.034,00	M2
19	RTP Gondang Winangun	Gondangwinagun Ngadirejo	10.000,00	M2
		JUMLAH I	59.821,73	M2
II	**HUTAN KOTA**			
20	Hutan Kota Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	9.450,00	M2
21	Hotan Kota Gumuk Godek	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.500,00	M2
		JUMLAH II	10.950,00	M2
III	**PULAU JALAN**			
22	Tugu Adipura	Jl Lingkar Setda Temanggung	51,00	M2
23	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	8,75	M2
24	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl Diponegoro Tmg	96,43	M2
25	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl Sri Suwarno Tmg	68,25	M2
26	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	67,12	M2
27	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan pasar Kranggan	30,86	M2
28	Pulau Jalan Pasar Parakan	Pertigaan Pasar Legi Parakan	63,80	M2
		JUMLAH III	386,21	M2
IV	**JALUR HIJAU**			
29	Jalur Hijau Jl Gajahmada	Jl Gajahmada Temanggung	1.665,71	M2
30	Jalur Hijau Jl Diponegoro	Jl Diponegoro Temanggung	460,30	M2
31	Jalur Hijau Jl Sudirman I	Jl Jend Sudirman Temanggung	258,40	M2
32	Jalur Hijau Jl Sudirman II	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.160,00	M2
33	Jlr Hijau Jl Suwandi Suwardi	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	-	M2
34	Jalur Hijau Jl R. Suprapto	Jl R. Suprapto Temanggung	258,00	M2
35	Jalur Hijau Jl S Parman	Jl S. Parman Temanggung	434,00	M2
36	Jalur Hijau Jl Tent. Pelajar	Jl Tentara Pelajar Temanggung	234,00	M2
37	Jalur Hijau Jl Ahmad Yani	Jl Ahmad Yani Temanggung	50,00	M2
38	Jalur Hijau Jl Suyoto	Jl Suyoto Temanggung	369,00	M2

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	SATUAN
39	Jalur Hijau Jl Raya Kranggan	Jl Raya Kranggan - Temanggung	1.102,40	M2
40	Jalur Hijau Jl Letnan Suwaji Parakan	Jl Letnan Suwaji Parakan	615,95	M2
41	Jalur Hijau Jl Katamso Parakan	Jl Katamso Parakan	86,51	M2
42	Jalur Hijau Jl. Suwandi Suwardi	Jl.Suwandi Suwardi	1.050,00	M2
43	Tugu Batas Kaliampo	Jl. Pringsurat - Temanggung	450,00	M2
		JUMLAH IV	8.194,27	M2
		JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)	**79.352,21**	M2

15) PERSENTASE USAHA YANG MEMILIKI RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib membuat rincian teknis limbah B3 sehingga dapat diketahui persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, dengan formulasi perhitungan menggunakan jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%. Sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

a) Peraturan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaran PPLH.

Rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) dikeluarkan sejak tahun 2019 setelah adanya PermenLHK Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sebelum tahun 2019 DPRKPLH Kabupaten Temanggung langsung

menerbitkan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3), sedangkan mulai tahun 2019 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengeluarkan rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3). Karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran PPLH tahun 2021 maka indikator tentang pengelolaan limbah B3 berubah menjadi Persentase Usaha yang Memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3. Tahun 2022 persentase kajian teknis penyimpanan limbah B3 sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan hal ini karena adanya kajian terhadap permohonan rincian teknis B3 rencana pembangunan RSIA Hendrata Mulia. Untuk tahun 2023 persentase kajian terhadap permohonan rincian teknis penyimpanan limbah B3 juga tercapai 100% sehingga capaian sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya permohonan dan kajian terhadap dokumen yang diajukan oleh 10 usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung dengan rincian pada tabel di atas. Realisai tahun 2024 sampai dengan triwulan I persentase kajian terhadap permohonan rincian teknis penyimpanan limbah B3 juga tercapai 100% sehingga capaian sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya permohonan dan kajian terhadap dokumen yang diajukan oleh:

1. Apotek Erika Farma
2. Apotek Erika Farma 2
3. Apotek Husna Farma
4. Puskesmas Dharma Rini

Faktor pendorong dari capaian indikator tersebut di atas antara lain adanya regulasi yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis, sedangkan faktor penghambatnya antara lain peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK turunannya, sehingga

kegiatan dan/atau usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut. Sebagai rekomendasi dan tindaklanjutnya dengan cara mendorong usaha dan/atau kegiatan untuk membuat rincian teknis atau persetujuan teknis limbah B3.

16) PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA/KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup:

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan}}{\text{Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan}} \text{X100 \%}$$

Tabel 2.25
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

No	Tahun	Capaian			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	50	1
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	50	50
3	Capaian (%)	100	100	100	2,00

Pada tahun 2024 target kegiatan pembinaan dan pengawasan penaatan lingkungan di Kabupaten Temanggung sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha,

sampai dengan triwulan I pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap 1 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung. Kegiatan tersebut sudah dimulai pada bulan Maret tahun 2024 meskipun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

17) CAKUPAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Sebagai Dasar Hukumnya adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Formulasi perhitungan jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total

sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sekolah Adiwiyata	193	193	205	209	209	209
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	744	750	750	750	750
Persentase (%)	26,48	26,48	27,33	27,87	27,87	27,87

Capaian sampai triwulan I tahun 2024 capaian indikator cakupan sekolah berwawasan lingkungan masih sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 27,87%, karena pada tahun 2024 ini calon sekolah-sekolah Adiwiyata Kabupaten masih dalam masa pembinaan dan belum dilakukan penilaian. Faktor pendorong capaian indikator ini diantaranya sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan.

Faktor penghambat antara lain rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata sehingga dalam upaya meningkatkan capaian indikator ini dengan mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. Selain itu juga melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya

penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

18) PERSENTASE PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/ Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim.

Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.27
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	-	-	14	11	16	0
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	-	-	17	13	9	15
Persentase (%)	-	-	82,35	84,62	178	0

Keterangan:
Jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diusulkan tiap tahun berbeda – beda. berdasarkan data pengusulan rata-rata tiap tahun, tahun 2024 sebagai

berikut:

-	Hari Habitat	1 usulan/tahun
-	Adiwiyata	5 usulan/tahun
-	Kalpataru	2 usulan/tahun
-	Proklim	7 usulan/tahun
	TOTAL	15 usulan/tahun

Rumus Perhitungannya :

$$\text{Presentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup} = \frac{\sum \text{Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diperoleh}}{\sum \text{Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I belum ada penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperolah. Hal ini dikarenakan beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional masih dalam proses pengusulan dan/atau masih menunggu pengumuman pengusulan.

Faktor penghambat capaian indikator Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup antara lain :

1. informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun
2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan setiap tahun.

Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaaan terkait lingkungan hidup
3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan.

19) PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%.

Tabel 2.28
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	15	7	12	14	12	1
Jumlah pengaduan yang masuk	15	7	12	14	12	1
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif.

Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar SKPD

terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelesatarian lingkungan hidup.

20) PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manuasia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

a. Pengurangan Sampah (waste minimization) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
b. Penanganan sampah (waste handling) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai penganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau container sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang

diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan terdiri dari :

1. Pengurangan sampah

   Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan bank sampah.

2. Penanganan sampah

   a. Persentase sampah tertangani di Sumber

      yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

   b. Persentase sampah tertangani di TPA

      Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), dan pengelolaan lindi.

   c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengakutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan. Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

      Rumus Persentase sampah tertangani adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

3. Persentase Pengoperasian TPA

   Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penangan gas metan

Timbulan sampah terkelola di Kabupaten Temanggung

pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 64,20% yang terdiri dari persentase pengurangan sampah sebesar 31,42% atau 11.605,96 ton dan persentase penanganan sampah sebesar 32,78% atau 12.107,61 ton. Apabila dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2023 mengalami kenaikan, yang disebabkan oleh penambahan jumlah cakupan pelayanan persampahan.

Tabel 2.29
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No		Uraian	Capaian s.d Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengurangan sampah							
	1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	7,22	164,00	18.306,20	40.499,26	44.305,18	11.605,96
		a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga				29.210,07	32.418,7	8.495,46
		b. Pembatasan sampah di Sekolah					49,23	12,27
		c. Pembatasan sampah di Perkantoran					125,87	31,38
		d. Bank Sampah (Ton/tahun)	7,22	164,00	49,90	45,19	39,19	8.59
		e. TPSD (Ton/tahun)	-	-	18.256,30	6.534,27	6.893,36	1.718,62
		f. TPS3R				4.709,73	4.778,82	1.339,63
	2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)		0,09	10,03	27,73	30,06	31,42
2	Penanganan sampah							
	1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	154,74	43.839,97	40.112,11	45.764,61	46.030,71	12.107,61
		a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	71,49	8.689,15	1.887,63	2.062,85	2.055,30	594,44
		b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	83,25	35.150,82	38.224,48	43.701,76	43.975	11.513,00
	2.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	490,92	497,64	500,17	400,17	403,72	405,90
		b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	176.731	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,00	36.936,81
	3.	Presentase Penanganan Sampah (%)	32,99	24,23	21,97	31,33	31,24	32,78
3	Pengelolaan Sampah							
	1.	Persentase Pengelolaan Sampah (%)		24,32	32	59,06	61,30	64,20

21) CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
c. Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah

Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus **perhitungan** cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.30
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	136	131	155	177	198	205
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/ pengelolaan sampah mandiri	6	18	27	36	56	72
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	130	113	128	141	142	143
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	47,06	45,33	53,63	61,24	68,51	70,93

Sampai dengan bulan Maret tahun 2024 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 143 desa/kelurahan, swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri sebanyak 72 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 205 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 70,93% dari total jumlah desa/kelurahan.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri jumlahnya naik sebesar 6 (enam) desa,
2. Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda naik sebesar 1 (satu) desa,
3. Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebanyak 1 (satu) desa.

Pada tahun 2024 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan program Desa Bebas Sampah akan banyak dilakukan oleh Desa se Kabupaten Temanggung, yaitu dengan adanya pembentukan kelembagaan pengelola sampah desa, pengadaan sarpras persampahan serta opersianal pengelola sampah. Seperti diketahui pada tahun 2019 Program Desa Bebas Sampah masih berfokus pada pembangunan SDM yang meliputi pelatihan/Bimtek FPK, FPD dan PSRT.

Faktor pendorong cakupan pelayananan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/kelurahan dalam pelayanan persampahan.

Faktor penghambatnya pelayanan persampahan adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
- Belum semua desa mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh, Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

22) TERSEDIANYA FASILITAS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN YANG MEMADAI

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, arm roll truck.

Tabel 2.31
Daftar Depo Transfer Tahun 2024

No	Nama Barang	Ukuran Bangunan	Luas Tanah	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	Depo Transfer Parakan Kauman	7 m x 7 m	21 m x 10 m	1 unit	Parakan Kauman	Bangunan Permanen
2	Depo Transfer Seklontong	2 m x 4 m	7 m x 10 m	1 Unit	Temanggung II	Semi Permanen
3	Depo Transfer Banyuurip	4 m x 5 m	7 m x 10 m	1 Unit	Banyuurip	Bangunan Permanen
4	Depo Transfer Jampirejo	2 m x 4 m	7 m x 5 m	1 Unit	Jampirejo	Semi Permanen

Tabel 2.32
Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
1	TPS3R Kebonsari	Temanggung	APBN	2012	Kembangasri
2	TPS3R Madureso	Temanggung	APBN	2015	Madu Asri
3	TPS3R Nguwet	Kranggan	APBN	2015	Usaha Mandiri
4	TPS3R Morobongo	Jumo	APBD	2015	Indah Lestari
5	TPS3R Parakan Kauman	Parakan	APBD	2016	Parakan Kauman
6	TPS3R Muntung	Candiroto	APBN	2017	Saras Sejahtera
7	TPS3R Selopampang	Selopampang	APBN	2018	Seloyudho Makmur
8	TPS3R Menggoro	Tembarak	APBN	2018	Goro Makmur
9	TPS3R Kedu	Kedu	APBN	2018	Kedu Gumilar
10	TPS3R Kledung	Kledung	APBN	2018	Kledung Sido Asri
11	TPS3R Gondosuli	Bulu	APBN	2019	Resik Makmur
12	TPS3R Kundisari	Kedu	APBN	2019	Kebon Agung
13	TPS3R Mudal	Temanggung	APBD	2019	Desa Mudal
14	TPS3R Mondoretno	Bulu	APBD PROV	2020	Almond
15	TPS3R Jlegong	Bejen	APBN	2020	Jlegong Lestari
16	TPS 3R Traji	Parakan	DAK	2021	Madani
17	TPS 3R Sriwungu	Tlogomulyo	APBN	2021	Sriwungu Asri
18	TPS 3R Purbosari	Ngadirejo	APBN	2021	Purbo Asri
19	TPS 3R Balesari	Bansari	APBN	2021	Sehati
20	TPS 3R Walitelon Utara	Temanggung	KOTAKU	2021	Besus
21	TPS 3R Parakan Kauman	Parakan	KOTAKU	2021	Parakan Kauman
22	TPS 3R Parakan Wetan	Parakan	KOTAKU	2021	Bambu Runcing
23	TPS 3R Pandemulyo	Bulu	APBN	2022	Pandemulyo Barokah
24	TPS 3R Losari	Tlogomulyo	APBN	2022	Bersih Bersinar
25	TPS 3R Kranggan	Kranggan	DAK	2022	Sinar Progo
26	TPS 3R Keblukan	Kaloran	DAK	2022	Ngrumat Resik
27	TPS 3R Bandunggede	Kedu	DAK	2022	Manunggal Ngudi Resik
28	TPS 3R Mangunsari	Ngadirejo	DAK	2022	Sumber Arum
29	TPS 3R Kedungumpul	Kandangan	APBN	2023	Bumi Rejo
30	TPS 3R Getas	Kaloran	APBN	2023	Sumber Berkah
31	TPS 3R Mandisari	Parakan	DAK	2023	Laksita Sekar Mandiri
32	TPS 3R Joho	Temanggung	DAK	2023	Joho Resik Sejahtera
33	TPS 3R Danurejo	Kedu	DAK	2023	Danurejo Sumber Karya Manunggal

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
34	TPS 3R Ngaditirto	Selopampang	DAK	2023	Bhumi Tirta Abadi
35	TPS 3R Gambasan	Selopampang	DAK	2023	Bhakti Bhumi Sembawang
36	TPS 3R Pare	Kranggan	DAK	2023	Abdi Manunggal Karya
37	TPS 3R Kaloran	Kaloran	DAK	2023	Berkah Resikan Kaloran
38	TPS 3R Petirejo	Ngadirejo	DAK	2023	Bersih Jaya Mandiri

Tabel 2.33
Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Alat Berat	7	7	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	17	17	17	17	17	17	Unit	8 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	7	7	11	11	11	11	Unit	Baik, (3 Milik Dindagkop,4 pengadaan 2021)
4	Pick Up	9	9	9	9	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	27	29	34	34	34	34	Unit	7 Rusak Berat
	○ Roda 3 Kecamatan Temanggung (DPRKPLH)	14	14	18	18	18	18		
	○ Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/ TPA	6	6	7	7	7	7		
	○ Roda 3 Cadangan	6	8	4	1	1	1		
	○ Roda 3 Rusak Berat	1	1	5	7	7	7		
7	Gerobak Sampah	55	59	59	59	59	59	Unit	
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA		10	10	10	10	10		6 unit layak operasi 53 rusak
	b. Gerobak Sampah Cadangan		4	4	4	4	4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung	29	29	29	29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1, Jumo 1 dan Tembarak 1)	7	8	8	8	8	8		
	e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	n/a	8	8	8	8		
8	Kontainer Sampah	27	28	28	33	32	32	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R	3	5	5	6	6	6		
	b. Kontainer Armroll		4	4	7	7	7		
	c. Kontainer Depo Transfer	5	5	5	4	4	4		
	d. Kontainer Lainnya		6	6	9	9	9		
	e. Kontainer Rusak Berat	n/a	1	1	1				
	f. Kontainer Pasar	n/a	7	7	7	7	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	-	2	2	2			Unit	Baik

Tabel 2.34
Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Kondisi
		**Tahun 2015*/2018 ** **	**Desember Tahun 2020**					
1	Excavator	2*	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Rusak Berat
2	Buldozer	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Baik

No	Peralatan	Jumlah Aset		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Kondisi
		**Tahun 2015*/2018 **	**Desember Tahun 2020**					
3	Mesin Pencacah (Kompos/Organik)	4**	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak Berat
6	Mesin Press Plastik	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak/ dalam perbaikan

Alat pengolah sampah yang ada di TPA Sanggrahan selain alat berat, belum dapat difungsikan, karena tenaga yang ada di TPA Sanggrahan hanya 11 orang yang terdiri dari, 2 Struktural (Ka UPT dan Ka TU), 3 Operator Alat Berat, 2 Supporting Staf Admin, 2 Supporting Staf Kebersihan, 2 Supporting Staf Jaga Malam.

Data sarana dan sarana persampahan yang ada belum mencerminkan kebutuhan dalam penanganan pengelolaan persampahan. Kebutuhan sarana prasarana angkutan dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dilengkapi alat, tenaga, biaya operasional dan sistem pengelolaan yang cukup akan memenuhi target pengelolaan sampah minimal 80% sesuai target nasional minimal 78%, sedangkan pada target RPJMD sebesar 70%. Mengacu kepada Dokumen Laporan Akhir manajemen persampahan 2011 – 2038, guna mencukupi kebutuhan pelayanan persampahan secara bertahap dibutuhkan penambahan sarpras persampahan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

- Sebanyak 50 TPS 3R/TPST,
- 15 dump truck,
- 16 armroll truk,
- 306 becak sampah/roda tiga.

Guna mendukung pelaksanaan Pasal 28 dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang peran masyarakat, serta Pasal 12 dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan sampah/partisipasi masyarakat, maka di Kabupaten Temanggung di bentuk Lembaga Pengelolaan Masyarakat

secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Rukun Tetangga. Kelembagaan tersebut antara lain :

a. Tingkat Kabupaten di bentuk Dewan Persampahan/DP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/38/Tahun 2020 yang beranggotakan 12 (dua belas) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
b. Tingkat Kecamatan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan/FPK berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/298/Tahun 2020 yang beranggotakan 88 (delapan puluh delapan) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
c. Tingkat Desa/Kelurahan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Desa/Kelurahan/FPD/Kel diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Camat setempat yang beranggotakan 1.305 (seribu tiga ratus lima) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah,
d. Tingkat Rukun Tetangga di bentuk Penggiat Sampah Rukun Tetangga (PSRT) diangkat oleh Kepala Desa/Lurah yang beranggotakan kurang lebih 11.280 orang (per RT beranggotakan 2 orang).

Kelembagaan ini pada tahun 2019 lebih berfokus pada pengembangan SDM, berupa pelatihan/bintek TOT bagi FPK dan FPD, serta bintek bagi PSRT, sedangkan pada tahun 2020 sudah memulai untuk penyediaan sarana prasarana. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRKPLH bekerjasama dengan DP, FPK, FPD/Kel dan PSRT hingga tahun 2024 ini dapat dapat ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap desa/kelurahan telah melakukan bimtek terkait pengelolaan sampah
2. Terdapat relawan pengelolaan sampah sampai di tingkat RT yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu,
3. Beberapa desa telah memiliki sarpras pengelolaan persampahan, seperti:

a. Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD) sebanyak 91 desa;
b. Kontainer sampah di 55 (lima puluh lima) desa;
c. Mobil sampah di 43 unit;
d. Roda Tiga pengangkut sampah sebanyak 110 unit.

4. Terbentuknya kelembagaan pengelola sampah, seperti:
   a. BUMDES sebanyak 90 di desa
   b. KSM sebanyak di 46 desa
   c. Bank Sampah di 39 desa
5. Regulasi terkait persampahan, seperti;
   a. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di 67 desa
   b. Peraturan Desa tentang Retribusi Persampahan di 42 desa.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun pada sisi yang lain masih ada indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan upaya keras dan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dari 24 indikator sasaran dan indikator program terdapat 4 indikator dengan status capaian Rendah yaitu sebagai berikut:
   a. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)
   Hal ini disebabkan karena belum adanya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban apabila terjadinya bencana
   b. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada triwulan II tahun 2024

c. **Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup**

Hal ini disebabkan karena belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

d. **Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup**

Hal ini disebabkan karena informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun serta ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Sumber daya yang belum mencukupi dan mumpuni	- Kekurangan SDM dan sarana prasarana pendukung - SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi	- Keterbatasan anggaran dan SDM - SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
2.	Data pokok pembangunan	Data pokok dari bidang dan UPT belum tersaji dengan baik *dan update*	Kurang peduli nya SDM akan pentingnya data pokok
3.	Ketersediaan data rumah yang valid dan akurat	Ketersediaan data rumah yang tidak *update*	Perangkat daerah/ instansi vertikal (BPS) tidak menerbitkan data rumah, diperlukan adanya Perangkat Daerah yang sah untuk menetapkan data rumah
4.	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang profesional	Pemanfaatan hunian sewa yang dilaksanakan oleh UPT Rusunawa yang belum maksimal	Kurangnya jumlah personil pengelola dan belum lengkapnya peraturan pengelolaan/ sewa Rusunawa

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5.	Data DTKS belum mewakili data rumah tidak layak huni karena di luar data terpadu kesejahteran sosial (DTKS) masih banyak warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan penangan rumah tidak layak huni (RTLH)	Masih ada data warga MBR yang belum masuk DTKS	*Update* data yang melibatkan peran perangkat tingkat bawah (RT/RW)
6.	Data PSU	Data PSU di Kabupaten Temanggung belum tersaji dengan valid	PSU di perumahan yang lama belum terdata dan diserahkan ke Pemda
7.	Makam	- Data makam milik pemerintah, masyarakat dan organisasi/swasta belum valid - Makam non muslim belum terkelola dengan baik	- Pengampu makam belum terorganisasi dengan baik - Belum adanya tempat untuk pengabuan dan penyimpanan abu
8.	Sengketa tanah	Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid	Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid
9.	Pelayanan persetujuan lingkungan	- Pelaku usaha belum terbiasa dengan penerapan regulasi baru dalam perizinan berusaha - Kewenangan perizinan tidak hanya di Kabupaten	- Regulasi baru belum tersosialisasikan secara menyeluruh baik pada pelaku usaha maupun PD Teknis - Sistem OSS yang belum sempurna dan belum terintegrasi dengan sistem manajemen informasi lingkungan hidup
10.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Belum semua Bank Sampah unit di Kabupaten Temanggung terdata	- Masih banyak Bank Sampah yang belum memiliki SK pendirian Bank Sampah - Masih banyak Bank Sampah yang tidak melaporkan kegiatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
11.	Belum semua sekolah di Kabupaten Temanggung berpredikat Sekolah Adiwiyata	Kurangnya SDM untuk mengampu kegiatan adiwiyata di sekolah serta keterbatasan anggaran sekolah untuk menjalankan program adiwiyata	- Kurangnya kesadaran sekolah –sekolah tentang gerakan perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah - Keterbatasan anggaran untuk fasilitasi kegiatan Adiwiyata
12.	Pemeliharaan dan penataan aset RTH yang belum optimal	Kurang optimalnya pengelolaan di beberapa RTH	- Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pertamanan - Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan pertamanan
13.	Data RTH Perkotaan (Publik dan Privat) belum ada	Belum dilakukan inventarisasi data RTH Privat	Adanya peraturan baru terkait RTH
14.	Bertambahnya luas lahan kritis	- Sedimentasi di aliran sungai - menurunnya kualitas lahan - menurunnya debit pada sumber mata air	Pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah
15.	Pencemaran air dan udara	Belum optimalnya usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat terhadap upaya pengendalian sumber – sumber pencemaran belum maksimal
16.	Pengelolaan sampah	- Penanganan - Pengurangan sampah	- Sampah belum terkelola secara maksimal - Kurangnya SDM dan sarpras pengelolaan sampah
17.	Pelayanan persampahan	Sarana prasarana dan sumber daya manusia	Kurangnya sdm dan sarpras pelayanan persampahan
18.	Operasional TPA	Penataan sampah dengan control landfill	- Tidak tersedianya anggaran pengadaan tanah urug untuk penataan sampah; - Kondisi Alat berat yang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			sudah tidak maksimal; - Sampah yang masuk ke TPA belum terkelola secara maksimal
19.	Zona aktif yang tersedia di TPA sudah mencapai kapasitas maksimal	- Volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat - Masih tersedia lahan yang belum terbangun zona aktif	- Sampah yang masuk ke TPA kurang terkelola dengan maksimal - Penambahan area pelayanan persampahan - Terbatasnya anggaran dalam pembangunan zona aktif
20.	Pengelolaan IPLT	Kurangnya SDM dan sarpras pendukung	- Belum adanya regulasi yang mengatur retribusi - Kurang optimalnya sarpras unit IPLT - SDM yang terbatas - Tidak tersedianya alokasi biaya operasional pengolahan IPLT
21.	Pelayanan pengujian kualitas lingkungan yang belum optimal	- Belum tercukupi sumber daya manusia yang ada; - Proses permohonan akreditasi yang belum terlaksana - Pemenuhan kompetensi SDM yang ada belum tercukupi - Uji profisiensi belum terlaksana untuk parameter yang diajukan akreditasi - Penerapan dokumen sistem mutu yang belum maksimal	- Sumber daya manusia belum terpenuhi - Belum adanya anggaran untuk memenuhi proses permohonan akreditasi, pemenuhan kompetensi, verifikasi metode, uji profisiensi, serta biaya assessment akreditasi - -

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel di atas maka isu strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1) Perumahan
   a. Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni;
   b. Pengurangan backlog perumahan;

c. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang professional.

2) Permukiman
   a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
   b. Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni;
   c. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak.

3) Persampahan
   a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
   b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
   c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
   d. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
   e. Daya tampung TPA yang ada sudah *overload.*

4) Lahan Kritis
   a. Pengurangan lahan kritis melalui konservasi tanah dan air secara berkelanjutan;
   b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
   c. Edukasi tentang pengelolaan lahan kepada masyarakat sesuai dengan kaidah konservasi.

5) Ketersediaan Air
   a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll);
   b. Pelestarian sumber mata air.

6) RTH Perkotaan (Pertamanan)
   a. Terbatasnya SDM pengelolaan RTH;
   b. Terbatasnya sarpras pemeliharaan pertamanan;
   c. Inventarisasi data RTH Privat.

7) Pengelolaan Lingkungan Hidup
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (kualitas air maupun udara);
   b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat dan usaha/kegiatan untuk kelestarian lingkungan hidup;
   c. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana laboratorium untuk pemenuhan laboratorium terakreditasi dan labolatorium teregistrasi KLHK.

2.4. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada hasil penetapan Renja Tahun 2025 terhadap Rancangan Awal Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi yang menangani urusan tata ruang.
2. Terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
   a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
   c. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
   d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   e. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
   g. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.36

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif			Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan					Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
	TARGET PENDAPATAN					**2.100.000.000**	**TARGET PENDAPATAN**					**2.100.000.000**	
	BELANJA					**28.712.381.884**	**BELANJA**					**39.387.258.584**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**-**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**-**	
1.03.04.2	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**					**-**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**					**-**	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					-	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)**		**100%**	**-**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)**		**100%**	**10.419.879.000**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**-**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**Terlaksananya Pembangunan untuk Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik**	**1000 Rumah Tangga**	**10.419.879.000**	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1 03 05 2.01 0039	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Temanggung		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**6.175.000.000**
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**		**4,11%**	**275.000.000**
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi		**88,40%**	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Terlaksananan ya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananan ya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Rusunawa 12 Bulan	275.000.000
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kelurahan Kertosari,Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman Kelurahan Manggong, Kelurahan Kranggan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	72 Dokumen	275.000.000
				Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Rusunawa	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Temanggung		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		10.419.879.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**6.430.000.000**	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		**Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**		**4,11%**	**316.091.000**	
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi		**88,40%**		
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Terlaksananan ya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananan ya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Rusunawa 12 Bulan	316.091.000	
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kelurahan Kertosari,Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman Kelurahan Manggong, Kelurahan Kranggan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	72 Dokumen	316.091.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Rusunawa		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase rumah layak huni**		**95,89%**	**5.900.000.000**
			Persentase kawasan kumuh perkotaan		**4,82%**	
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		**100%**	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)		**100%**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**			**Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni**	**271 unit rumah**	**5.900.000.000**
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M)			Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	271 unit rumah	5.900.000.000
		Kabupaten Temanggung		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	237 unit rumah	5.186.000.000
		Kecamatan Kaloran		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	34 unit rumah	714.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025					Ket.
	Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		**Persentase rumah layak huni**		**95,89%**	**6.113.909.000**	
		Persentase kawasan kumuh perkotaan		**4,82%**		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		**100%**		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)		**100%**		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			**Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni**	**283 unit rumah**	**6.113.909.000**	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M)			Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	283 unit rumah	6.113.909.000	
	Kabupaten Temanggung		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	237 unit rumah	6.113.909.000	
	Kecamatan Kaloran		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (M)	34 unit rumah	714.000.000	
	Kabupaten Temanggung		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (Pokir)	12 unit rumah	255.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
2.10.04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**		**Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan**		**100%**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**22.537.381.884**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah**		**100%**	**18.252.381.884**
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan**	**100%**	**12.436.291.184**
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	133 orang/ bulan	12.436.291.184
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase ketersediaan administrasi umum**	**100%**	**113.000.000**
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	22.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025					Ket.
	Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					-	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		**Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan**		**100%**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**22.537.379.584**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah**		**100%**	**18.252.379.584**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan**	**100%**	**12.436.291.184**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	133 orang/ bulan	12.436.291.184	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Persentase ketersediaan administrasi umum**	**100%**	**112.998.500**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	22.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**41.000.000**
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	16.000.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	25.000.000
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang**	**100%**	**5.482.090.700**
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	105.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.375.090.700

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025					Ket.
	Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39.998.500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**41.000.000**	
Pengadaan Mebel	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	16.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	25.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang**	**100%**	**5.482.090.700**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	105.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.375.090.700	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase pemeliharaan barang siap pakai**	**100%**	**180.000.000**
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPRKPLH Kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	100.000.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kab. Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70.000.000
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 Unit	10.000.000
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**		**100%**	**160.000.000**
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup		**100%**	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Persentase pemeliharaan barang siap pakai**	**100%**	**179.999.200**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPRKPLH Kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kab. Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	69.999.200	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 Unit	10.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**		**100%**	**50.000.000**	
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup		**100%**		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**			**Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)**	**1 Dokumen**	**25.000.000**
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000
2.11.02.2.02.0002	**Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**			Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten Kota	1 dokumen	**135.000.000**
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	135.000.000
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Indeks kualitas air**		**53,30**	**250.000.000**
			Indeks kualitas udara		**83,87**	
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis		**0,067%**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**75,46**	**115.000.000**
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	1 dokumen	25.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025					Ket.
	Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			**Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**Indeks kualitas air**		**53,30**	**250.000.000**	
		Indeks kualitas udara		**83,87**		
		Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis		**0,067%**		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**75,46**	**115.000.000**	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	1 dokumen	25.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
	Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Dokumen	90.000.000
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota**	1 Ha	**135.000.000**
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Kabupaten Temanggung		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	1 Ha	135.000.000
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani**		**65,00%**	**305.000.000**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**			**Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota**	7,96 ha	**305.000.000**
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7,96 ha	300.000.000
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kebun Ngipik Pringsurat		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang	1 Unit	5.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Dokumen	90.000.000	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			**Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota**	1 Ha	**135.000.000**	
Pelaksanaan rehabilitasi	Kabupaten Temanggung		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	1 Ha	135.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani**		**65,00%**	**380.000.000**	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			**Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota**		**380.000.000**	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7,96 ha	375.000.000	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kebun Ngipik Pringsurat		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang	1 Unit	5.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
				Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3**		**100%**	**-**
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup**		100%	10.000.000
2.11.06. 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi**	50 Usaha dan/ Kegiatan	10.000.000
2.11.06.2 .01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha	10.000.000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN**		**Persentase sekolah berwawasan lingkungan**		**30,00%**	**-**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
			Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3**		**100%**	**-**	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup**		**100%**	**10.000.000**	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi**	**50 Usaha dan/ Kegiatan**	**10.000.000**	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha	10.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN		**Persentase sekolah berwawasan lingkungan**		**30,00%**	**-**	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup**		**100%**	**35.000.000**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**15 Penghargaan**	**35.000.000**
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	35.000.000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**		**100%**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Persentase sampah yang tertangani**		**60,50%**	**3.525.000.000**
			Cakupan layanan persampahan		**66,44%**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**			**Jumlah sampah yang terkelola**	**91484,56 Ton**	**3.525.000.000**
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Temanggung		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat	203 Kelompok	25.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup**		**100%**	**70.000.000**	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**15 Penghargaan**	**70.000.000**	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	70.000.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**		**100%**		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**Persentase sampah yang tertangani**		**60,50%**	**3.525.000.000**	
		Cakupan layanan persampahan		**66,44%**		
Pengelolaan Sampah			**Jumlah sampah yang terkelola**	**91484,56 Ton**	**3.525.000.000**	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Temanggung		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat	203 Kelompok	25.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				
		Lokasi	Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif
			Program,	Kegiatan, Sub Kegiatan		
				atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
2.11.11.2 .01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPA Sanggrahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	1.600.000.000
2.11.11.2 .01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kabupaten Temanggung		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	91.484,5 6 Ton	2.000.000.000
JUMLAH BELANJA						**28.712.381.884**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025				Ket.
		Indikator		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	
		Program	Kegiatan Sub Kegiatan			
			atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPA Sanggrahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	1.600.000.000	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kabupaten Temanggung		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	91.484,56 Ton	1.900.000.000	
JUMLAH BELANJA					**39.387.258.584**	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.37
Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kaloran	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	34 Unit	Pelaksanaan kegiatan tersebar di 14 Desa

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Dukungan				
1	Temanggung Bebas Sampah	DPRKPLH, Kecamatan, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD	Program Temanggung Bebas Sampah merupakan program dalam bentuk pedoman pengelolaan sampah di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan membentuk sistem kelembagaan terstruktur dari tingkat kabupaten hingga rukun tetangga yaitu Dewan Persampahan dan Fasilitator Persampahan Kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati kemudian Fasilitator Persampahan Desa dan Pengiat Sampah Rukun Tetangga yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Tujuan pembentukan kelembagaan ini adalah agar pengelolaan sampah dapat digerakkan mulai dari skala terkecil yaitu rumah tangga dan setiap tingkatannya dapat termonitoring oleh Pemerintah Daerah supaya jumlah sampah yang ada di lingkungan dan di TPA dapat diminimalkan. Dalam pelaksanaan program ini, didukung dengan pembentukan regulasi mulai dari Perda hingga Perdes. Selain itu dibuat juga aplikasi pengelolaan sampah yang dapat menghimpun data pengelolaan sampah dari unit terkecil seperti Bank Sampah dan TPS hingga data TPA, dapat mengatur jadwal pengangkutan sampah oleh Pemda dan dilengkapi dengan fitur aduan sampah liar oleh masyarakat.	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan	DPRKPLH 2022
2	Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan	Pemerintah, swasta, masyarakat.	KLHK, APBD, CSR, perusahaan/ BUMN, dan institusi pendidikan	Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan merupakan gerakan bersama dalam rangka penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, khususnya di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau. Gerakan ini menitikberatkan pada keterlibatan semua unsur, baik dari sisi Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Bentuk gerakan ini berupa gerakan penanaman pohon (tanaman konservasi dan tanaman produktif) secara masif di wilayah Gunung Sumbing,	Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Temanggung akan pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian tanah dan air.	DPRKPLH 2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Dukungan				
				Sindoro, dan Prau yang dilaksanakan oleh relawan bersama masyarakat Temanggung. Bibit pohon yang ditanam berasal dari bantuan pihak ketiga diantaranya KLHK, CSR perusahaan/BUMN, dan institusi pendidikan. Gerakan ini diharapkan dapat membawa manfaat baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi ekonomi, sehingga pengendalian ekosistem di Temanggung dapat berjalan beriringan dengan hasil ekonomi yang didapat dari tanaman produktif yang ditanam. Gerakan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Temanggung akan pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian tanah dan air.			

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan skala provinsi dan nasional yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.39
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
A.	**TAHUN 2024**			
1	Penghargaan Desa Mandiri Sampah Madya dari Desa Balesari Kecamatan Bansari	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
2	Desa Mandiri Sampah Muda dari Desa Jumo Kecamatan Jumo	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
3	Desa Mandiri Sampah Muda dari Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
4	Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 5 Temanggung	Gubernur Jawa Tengah melalui DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
5	Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 1 Tembarak	Gubernur Jawa Tengah melalui DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
6	Sekolah Adiwiyata Provinsi MTs N 2 Temanggung	Gubernur Jawa Tengah melalui DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
7	Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kelompok Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MPP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) : MPA Abdi Bumi Ds. Batursari Kec. Kledung	DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
8	Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup atas nama Sukoyo (Dsn. Krecek Ds. Getas Kec. Kaloran)	DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
9	Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup Kelompok Pecinta Alam (KPA) Azora Ds. Batursari Kec. Kledung	DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
10	Inovasi Proklim (Kategori Video Inovasi ProKlim Terbaik 1 (Ds. Gununggempol Kec. Jumo))	DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
B.	**TAHUN 2023**			
1	Penghargaan Nirwasita Tantra untuk Kategori Kabupaten Sedang	Presiden RI melalui KLHK	Nasional	Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
2	Terbaik I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional, atas nama R. Gravita Eka Purnama	KLHK	Nasional	DPRKPLH
3	Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional Tahun 2023: a.n. Fatah Syaifur Rochman	KLHK	Nasional	DPRKPLH
4	Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 : SMP N 6 Temanggung	KLHK	Nasional	DPRKPLH

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
5	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 : SD N 3 Tuksongo	KLHK	Nasional	DPRKPLH
6	Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Utama: Desa Batursari, Kecamatan Kledung	KLHK	Nasional	DPRKPLH
7	Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Utama: Desa Ketitang Kecamatan Jumo	KLHK	Nasional	DPRKPLH
8	Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Madya: Desa Petarangan, Kecamatan Kledung	KLHK	Nasional	DPRKPLH
9	Juara harapan I Lomba Hari Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
10	Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam, a.n. R. Gravita Eka Purnama	Gubenur Jawa tengah	Provinsi	DPRKPLH
11	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
12	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
13	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
14	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
15	Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup atas nama Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak.	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
16	Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup atas nama Fatah Syaifur Rochman	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
C.	**TAHUN 2022**			
1	Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama : Desa Gununggempol Kecamatan Jumo	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
2	Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya : Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
3	Juara Harapan 3 Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 : Rowali Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
4	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 : SDN Tlahap Kecamatan Kledung	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
5	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengan Tahun 2022 : MI Negeri 2 Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
6	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengan Tahun 2022 : SMP Negeri 3 Kedu	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
7	Juara II Sekolah Hijau Tingkat Jateng-DIY: MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak	Ketua MLH PP Muhammadiyah	Jateng-DIY	DPRKPLH

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Tupoksi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025	Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026	Indikator Sasaran	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Persentase Sampah yang Tertangani - Cakupan Layanan Persampahan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka Tujuan dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah

1. Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025 ini adalah dalam rangka Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas. Sedangkan Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan pada tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu dan meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025

VISI	:	**TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA**
MISI 5	:	**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA LESTARI BERBASIS PADA PARTISIPASI AKTIF SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MEMPERHATIKAN DIMENSI TATA RUANG**

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR	KETERANGAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	99,03	99,03	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
				1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,11	3,75	Indikator Program : Program Pengembangan Perumahan
				2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	88,40	88,50	
				3. Persentase rumah layak huni	%	95,89	96,25	Indikator Program : Program Kawasan Permukiman
				4. Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,82	4,80	
				5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	
				6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	
				7. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	Indikator Program : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,46	75,50	- Indikator Sasaran - Perhitungan IKA, IKU dan IKL mengalami perubahan metode perhitungan dan target telah ditentukan oleh KLHK

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR	KETERANGAN
								- Perubahan mulai tahun 2025
			Meningkatnya Kualitas Air	A. Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	74,17	74,27	- Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah - Perhitungan IKA, IKU dan IKL mengalami perubahan metode perhitungan dan target telah ditentukan oleh KLHK - Perubahan mulai tahun 2025
			Meningkatnya Kualitas Udara	B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,00	85,01	
				1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	Indikator Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				2. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	Indikator Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				3. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
				4. Persentase luas lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis	%	0,067	0,067	Indikator Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				5. Persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani	%	63,90	63,90	Indikator Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				6. Persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	Indikator Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				7. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	100	100	Indikator Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR	KETERANGAN
								Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				8. Presentase Sekolah Adiwiyata Kabupaten	%	90,00	100	- Indikator Program : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Perubahan indikator beserta target mulai tahun 2025
				9. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	Indikator Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				10. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	Indikator Program : Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				11. Persentase sampah yang tertangani	%	61,75	62,00	- Indikator Program : Program Pengelolaan Persampahan - Perubahan target indikator mulai tahun 2025
				12. Cakupan layanan persampahan	%	71,28	71,62	

Kebijakan dan strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, hal tersebut dalam rangka upaya menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada penyesuaian pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			SELISIH
No	**Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Selisih**
I	**TARGET PENDAPATAN**	**2.100.000.000**	**I**	**TARGET PENDAPATAN**	**2.100.000.000**	**-**
						-
II	**BELANJA**	**28.712.381.884**	**II**	**BELANJA**	**39.387.258.584**	**10.674.876.700**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**-**	**A**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**10.419.879.000**	**10.419.879.000**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**-**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**10.419.879.000**	**10.419.879.000**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**10.419.879.000**	**10.419.879.000**
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10.419.879.000	10.419.879.000
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**6.175.000.000**	**B**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**6.430.000.000**	**255.000.000**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**316.091.000**		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**316.091.000**	**-**
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**316.091.000**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**316.091.000**	**-**
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	316.091.000		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	316.091.000	-
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**5.858.909.000**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**6.113.909.000**	**255.000.000**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**5.858.909.000**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**6.113.909.000**	**255.000.000**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M)	5.858.909.000
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**22.537.381.884**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**18.252.381.884**
a	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.436.291.184**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.436.291.184
b	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**113.000.000**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000
c	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41.000.000**
1	Pengadaan Mebel	16.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.482.090.700**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.375.090.700
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.000.000**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Selisih
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M)	6.113.909.000	255.000.000
			-
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**22.537.379.584**	**(2.300)**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**18.252.379.584**	**(2.300)**
a	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.436.291.184**	**-**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.436.291.184	-
b	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.998.500**	**(1.500)**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	-
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	-
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.998.500	(1.500)
c	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41.000.000**	**-**
1	Pengadaan Mebel	16.000.000	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	-
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.482.090.700**	**-**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.375.090.700	-
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.999.200**	**(800)**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**50.000.000**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**50.000.000**
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**250.000.000**
a	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**115.000.000**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25.000.000
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	90.000.000
b	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**135.000.000**
	Pelaksanaan rehabilitasi	135.000.000
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**380.000.000**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**380.000.000**
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	375.000.000
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	5.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Selisih
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	-
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.999.200	(800)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**50.000.000**	**-**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**50.000.000**	**-**
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	-
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**250.000.000**	**-**
a	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**115.000.000**	**-**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25.000.000	-
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	90.000.000	-
b	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**135.000.000**	**-**
	Pelaksanaan rehabilitasi	135.000.000	-
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**380.000.000**	**-**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**380.000.000**	**-**
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	375.000.000	-
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	5.000.000	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**10.000.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**70.000.000**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**70.000.000**
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**3.525.000.000**
	Pengelolaan Sampah	**3.525.000.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	25.000.000
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.600.000.000
3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.900.000.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**28.712.381.884**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Selisih
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**10.000.000**	**-**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**-**
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000	-
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**70.000.000**	**-**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**70.000.000**	**-**
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.000.000	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**3.525.000.000**	**-**
	Pengelolaan Sampah	**3.525.000.000**	**-**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	25.000.000	-
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.600.000.000	-
3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.900.000.000	-
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**39.387.258.584**	**10.674.876.700**

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan pagu indikatif tahun 2025 pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.674.876.700,- dari semua usulan sumber dana, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan penambahan anggaran yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk pembangunan tangki septic individu dalam rangka untuk pencegahan stunting
2. Penambahan anggaran yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 255.000.000,- untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Temanggung
3. Penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						**39.387.258.584,00**							**47.048.335.552,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.849.879.000,00**							**18.500.000.000,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**10.419.879.000,00**							**12.000.000.000,00**
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)***	**100 %**			**100 %**	**10.419.879.000,00**						**100 %**	**12.000.000.000,00**
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan untuk Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik*	-			1000 Rumah Tangga	10.419.879.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan	Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Penanganan Stunting	-	12.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
											sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan			
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1000 Rumah Tangga	10.419.879.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan	Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Penanganan Stunting		12.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**6.430.000.000,00**							**6.500.000.000,00**
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi***	**3,75% 88,5%**			**4,11% 88,40%**	**316.091.000,00**						**3,75% 88,5%**	**500.000.000,00**
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Terlaksananannya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananannya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	-			6 Rusunawa 12 Bulan	316.091.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah	-	500.000.000,00
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus				72 Dokumen	316.091.000,00	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah		500.000.000,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase kawasan kumuh perkotaan*** ***Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)*** ***Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang***	**100%** **100%** **4,8%** **96,25%**			**100%** **100%** **4,82%** **95,89%**	**6.113.909.000,00**						**100%** **100%** **4,8%** **96,25%**	**6.000.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) Persentase rumah layak huni												
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni*	-			283 unit	6.113.909.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, pe ningkatan rata-rata lama sekolah, serta penin gkatan sumber daya manusia yan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah layak huni	-	6.000.000.000,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				283 Unit Rumah	6.113.909.000,00	Kab. Temanggun, Kaloran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	1. Peningka tan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah layak huni		6.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										Pelayanan Dasar	berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.537.379.584,00**							**28.548.335.552,00**
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**22.537.379.584,00**							**28.548.335.552,00**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah***	**100%**			**100%**	**18.252.379.584,00**						**100%**	**18.803.835.552,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan*	-			**100** %	12.436.291.184,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	ASN DPRKPLH	-	12.622.835.552,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				129 Orang/ bulan	12.436.291.184,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	ASN DPRKPLH		12.622.835.552,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum*	-			100 %	112.998.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH	-	126.000.000,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		7.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		24.000.000,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		22.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		27.000.000,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	39.998.500,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		45.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100%	41.000.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH	-	70.000.000,00
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	16.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		35.000.000,00
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		35.000.000,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang*	-			100 %	5.482.090.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH	-	5.613.000.000,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		3.000.000,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		110.000.000,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.375.090.700,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 2.Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		5.500.000.000,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang siap pakai*	-			100 %	179.999.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH	-	372.000.000,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak				24 Unit	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		110.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		dan Perizinannya								Perubahan Iklim	perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan			
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69.999.200,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membang n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkel anjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		250.000.000,00
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui	Aktivitas Perkantoran DPRKPLH		12.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
											intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan			
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***	**100% 100%**			**100% 100%**	**50.000.000,00**						**100 % 100 %**	52.500.000,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	52.500.000,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Pengelolaan Lingkungan Hidup		52.500.000,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Indeks kualitas air*** ***Indeks kualitas udara*** ***Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis***	**53,80** **83,92** **0,067 %**			**53,30** **83,87** **0,067 %**	**250.000.000,00**						**53,80** **83,92** **0,067 %**	**552.000.000,00**
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	-			75,46 Angka	115.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan kualitas udara pada lokasi sampling yang telah disepakati bersama DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK RI.	-	302.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
											pariwisata dan kebuda yaan			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan kualitas udara pada lokasi sampling yang telah disepakati bersama DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK RI.		52.000.000,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				25 Dokumen	90.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan kualitas udara pada lokasi sampling yang telah disepakati bersama DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK RI.		250.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	*Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*	-			1 Ha	135.000.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Pemulihan lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan penanaman pohon (menerapkan metode konservasi vegetatif).	-	250.000.000,00
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi													
		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	135.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Pemulihan lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan penanaman pohon (menerapkan metode konservasi vegetatif).		250.000.000,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani***	**70.00 %**			**65.00 %**	**380.000.000,00**						**70.00 %**	**1.475.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			7.96 Ha	380.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	RTH Publik di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan	-	1.475.000.000,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				7,96 Ha	375.000.000,00	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3.Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	RTH Publik di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan		1.400.000.000,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan													
		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Temanggung, Pringsurat, Ngipik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	RTH Publik di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan		75.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Kewenangan Kabupaten/Kota							UMUM	Bencana Dan Perubahan Iklim	dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan			
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup***	**100 %**			**100 %**	**10.000.000,00**						**100 %**	**15.000.**000**,00**
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi*	-			50 Usaha dan/ Kegiatan	10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah	-	15.000.000,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi				50 Badan Usaha	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah		15.000.000,00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup***	**100 %**			**100 %**	**70.000.000,00**						**100 %**	**100.000.000,00**
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup*	-			15 Pengharga an	70.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebuda yaan	Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang peduli lingkungan hidup	-	100.000.000,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	70.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidi kan/ Filantrophi yang peduli lingkungan hidup		100.000.000,00
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase sampah yang tertangani Cakupan Pelayanan persampahan***	**61,00 % 68,17 %**			**60,50 % 66,44 %**	**3.525.000.000,00**						**61,00 % 68,17 %**	**7.550.000.000,00**
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah sampah yang terkelola*	-			91484.56 Ton	3.525.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat Desa/Kelurahan	-	7.550.000.000,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				203 Kelompok	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat Desa/Kelurahan		50.000.000,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	1.600.000.000,00	Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebudayaan	Masyarakat Desa/Kelurahan		5.000.000.000,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan				91484,56 Ton	1.900.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat Desa/Kelurahan		2.500.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						Kel/Desa	UMUM	Bencana Dan Perubahan Iklim	dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengemban gan pariwisata dan kebudayaan			
J U M L A H							**39.387.258.584,00**							**47.048.335.552,00**

BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya nanti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan pada Tahun 2025.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.284.825.192 (88,53%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

A. Belanja Operasi Rp. 35.267.525.192 (88,53%)

- Belanja Pegawai Rp. 11.738.194.173 (98,97%)
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.329.331.019 (83,39%)
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.200.000.000 (100%)

B. Belanja Modal Rp. 17.300.000 (92,02%)

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 17.300.000 (92,02%)

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I sebesar Rp. 14.515.959.655 (33,52%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

A. Belanja Operasi Rp. 14.315.488.411 (33,81%)
   - Belanja Pegawai Rp. 6.306.748.771,00 (50,68%)
   - Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.008.739.640 (33,60%)
   - Belanja Bantuan Sosial Rp. -

B. Belanja Modal Rp. 200.471.244,00 (20,66%)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran Belanja Program sebesar Rp. 39.387.258.584,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Temanggung, 03 Juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG,

PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013